

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON
TUNAI (BPNT) DALAM PENINGKATAN EKONOMI
KELUARGA MISKIN DI KELURAHAN KETAPANG
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

oleh:

**Kuswatun Khasanah
1401046049**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2020**

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 1 bendel
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Yth. Bapak Dekan Fakultas
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara/i :

Nama : Kuswaton Khasanah
NIM : 1401046049
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan/Konsentrasi : Pengembangan Masyarakat Islam
Judul : Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Miskin Di Kelurahan
Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Maret 2020

Pembimbing,
Bidang Metodologi dan Tata Tulis

Bidang Substansi Materi



Abdul Ghoni, M. Ag.

NIP. 19770709 200501 1 003



Drs. Kasmuri, M. Ag.

NIP. 19660822 199403 1 003

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)
DALAM PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA MISKIN DI
KELURAHAN KETAPANG KECAMATAN KENDAL KABUPATEN
KENDAL

Disusun Oleh :

Kuswatun Khasanah

1401046049

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 17 Maret 2020 dan dinyatakan telah LULUS memenuhi syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I



Drs. H. M. Mudhofi, M. Ag.

NIP. 19690830 199803 1 001

Penguji III



Sulistio, S.Ag., M. Si.

NIP. 19700202 199803 1 005

Pembimbing I



Abdul Ghoni, M. Ag.

NIP. 197709 200501 1 003

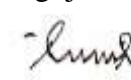
Sekretaris/Penguji II



Drs. H. Kasmuri, M. Ag.

NIP. 19660822 199403 1 003

Penguji IV



Dr. Agus Riyadi, M. SI.

NIP. 19800816 200710 1 003

Pembimbing II



Drs. H. Kasmuri, M. Ag.

NIP. 19660822 199403 1 003

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Pada tanggal, 19 Maret 2020

Dr. Ilyas Supena, M. Ag.
NIP. 19720410 200112 1 003

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi maupun di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 5 Maret 2020

Kuswatun Khasanah
NIM: 1401046049

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmannirohim

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang yang senantiasa telah menganugerahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis dalam rangka menyelesaikan karya skripsi dengan judul “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Miskin Di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal”, karya skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat sarjana sosial (S.Sos) bidang jurusan Pengembangan Masyarakat Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad S.A.W. nabi akhir zaman yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Tidak akan berarti tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Ilyas Supena, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Sulistio, S.Ag., M.Si selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.
4. Abdul Ghoni, M.Ag dan Drs. Kasmuri, M.Ag sebagai pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktunya memberikan arahan, bimbingan serta doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Dosen dan staf yang telah memberikan bimbingan dan wawasan selama pendidikan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.

6. Bapak Lurah Kelurahan Ketapang Kendal Muchamad Subechi SE, beserta jajarannya yang telah memberikan izin kepada peneliti dan meluangkan waktu kepada peneliti dalam rangka penggalian data.
7. Ibu Rukatun selaku pendamping program BPNT Kelurahan Ketapangan Ibu-Ibu penerima program BPNT Kelurahan Ketapang yang telah memberikan izin kepada peneliti dan meluangkan waktu kepada peneliti dalam rangka penggalian data.
8. Kedua orang tua serta kakak-adik saya yang senantiasa memberikan penulis cinta, kasih sayang, dorongan, dukungan, semangat, nasehat, serta do'a yang selalu dipanjatkan setiap saat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi strata I di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
9. Keluarga besar PMI 2014 yang telah memberikan sebuah pengalaman baru, kawan baru, cerita baru, serta kenangan manis yang tak terlupakan.
10. Keluarga besar Pondok Inna, Pondok Sunan Kali Jaga dan Pondok Al Hikmah yang telah memberikan sebuah pengalaman baru, kawan baru, cerita baru, serta kenangan manis yang tak terlupakan.
11. Sahabat karib saya Muhammad Abduh Abdul Khorib yang selalu memberi semangat, kasih sayang, motivasi, dukungan serta do'a yang selalu dipanjatkan dan tiada henti-hentinya untuk kelancaran peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman seperjuangan (Mufli, Mbak Alfi, Nikmah, Dima, Ela, Ifah) dan masih banyak tidak dapat disebutkan satu persatu yang selama ini senantiasa membantu penulis dalam proses penulisan dan penelitian hingga dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk dukungan dan bantuannya selama ini.
13. Rekan-rekan serta semua pihak terkait yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini tidak bisa disebutkan satu per satu. Akhirnya, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan baik. Meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin

untuk menghasilkan suatu karya yang baik, namun penulis menyadari bahwa sepenuhnya masih banyak kekurangan bahkan jauh dari sempurna baik dari segi bahasa, isi maupun analisis. Dan dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik serta saran guna menyempurnakan penyusunan skripsi ini. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi semua, fii dunia wal akhirat. *Amin Ya Robbal'Alamin.*

Semarang, 29 Februari 2020

Kuswatun Khasanah

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati karya sederhana ini kupersembahkan untuk:

Ayahanda Kasmudi dan Ibu Yatun

“Sebuah kata maaf dari putrimu yang telah menggantung lama di pundakmu dan kata terimakasih atas cinta, kasih sayang, dukungan, dorongan, nasehat serta do’a yang telah tcurahkan setiap saat kepada putrimu ini.”

Kakak-Adikku

“Kedua saudara kandungku yang darahnya sama mengalir dalam nadi kita, semoga menjadikan kita selalu saling kasih mengasihi dan saling menyayangi, serta menjadikan kita anak yang sholeh sholekhah yang mampu mengantarkan kedua orang tua kita ke surganya Allah SWT.”

Sahabat-sahabatku

“Terimakasih juga untuk sahabat-sahabatku yang telah memberikan motivasi, semangat dan dukungan serta do’a semoga kita bisa meraih kesuksesan bersama.”

MOTTO



“Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta ”(QS. Adz Dzariyat: 19)¹

¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002), hlm. 176.

ABSTRAK

Kuswatun Khasanah. 1401046049. Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Miskin Di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.

Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai yang dikembangkan oleh Pemerintah untuk meningkatkan ekonomi keluarga miskin. Pemilihan pelaksanaan program BPNT di Kelurahan Ketapang tidak serta merta ditentukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial RI akan melalui mekanisme pemilihan yang sudah ditetapkan. Kriteria pemilihan pelaksanaan program BPNT adalah: tingginya angka kemiskinan dan angka gizi buruk. Selain berdasarkan kriteria data tersebut yang tidak kalah penting adalah adanya komitmen daerah untuk melaksanakan program BPNT. Komitmen daerah tersebut dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan pelayanan yang merupakan kunci keberhasilan program BPNT. Rumusan masalah dalam penelitian ini, Bagaimanaimplementasi program bantuanpanganontunai (BPNT) dalam peningkatan ekonomi keluarga miskin di KelurahanKetapangKecamatan Kendal Kabupaten Kendal danBagaimanahasil yang telah di capaimelaluiimplementasiprogram bantuanpangan nontunai (BPNT) dalam peningkatan ekonomi keluarga miskin di KelurahanKetapangKecamatan Kendal Kabupaten Kendal.

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Sumber data yang digunakan peneliti adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data yang digunakan peneliti adalah triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya program BPNT Kelurahan Ketapang yang diterapkan dapat menjadikan masyarakatnya lebih mandiri dalam melakukan transaksi non tunai pada *e-Warong* Program BPNT dan membantu masyarakat dalam segi ekonomi seperti pemenuhan kebutuhan sehari-hari dapat mengurangi beban pengeluaran dari masyarakat yang dulunya tidak berkecukupan sekarang sudah semakin meningkat daya beli masyarakatnya. Meningkatkan efektivitas bantuan sosial dengan cara non tunai dalam pemberian bahan pangan, serta mendorong keuangan inklusif yakni mengikut sertakan masyarakat untuk menjadi wirausaha. Pemerintah membuat program BPNT berarti merangkul masyarakat dalam mengembangkan kemampuan berwirausaha dengan membuka *e-Warong* KUBE BPNT,tidak adanya penyalahgunaan dana bantuan yang diberikan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dengan menggunakan Kartu elektronik Keluarga Sejahtera (KKS) masyarakat tidak dapat menggunakan uangnya selain membeli bahan pangan beras dan telur.

Kata Kunci: Implementasi, Kemiskinan, BPNT, Ekonomi Keluarga

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Landasan Teori	
1. Implementasi	22
a. Pengertian Implementasi	22
b. Tahap- tahap Dalam Proses Implementasi	24
c. Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Proses	25
2. Kemiskinan	28
a. Pengertian Kemiskinan	28
b. Faktor Kemiskinan	32

3. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).....	34
a. Pengertian Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).....	34
b. Landasan Pelaksanaan BPNT	36
c. Pengukuran Keberhasilan Program BPNT	37
d. Indikator Penerima Program BPNT	38
4. Ekonomi Keluarga.....	39
a. Pengertian Ekonomi Keluarga.....	39
b. Aspek- aspek Dalam Ekonomi Keluarga	44

BAB III IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT)DALAM PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA MISKIN DI KELURAHAN KETAPANG KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL

A. Gambaran Umum Kelurahan Ketapang Kendal	47
1. Letak Geografis dan Batas Administratif.....	47
2. Kondisi Demografi	48
3. Kondisi Ekonomi Sosial Budaya.....	51
4. Struktur Organisasi Kelurahan Ketapang.....	56
B. Profil Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Kelurahan Ketapang	57
1. Sejarah Berdirinya Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.....	57
2. Visi dan misi Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.....	58
3. Tujuan Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal	59

4. Manfaat Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal	60
5. Prinsip Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal	60
6. Kriteria e-warung untuk pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal	61
7. Peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)	61
8. Tahap Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal	61
9. Implementasi Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal	63
10. Hasil Implementasi Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal	72

BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DALAM PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA MISKIN DI KELURAHAN KETAPANG KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL

A. Analisis Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Miskin Di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal	75
B. Analisis Hasil Yang Telah Di Capai Melalui Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam	

Peningkatan Ekonomi Keluarga Miskin Di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal	88
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	94
B. Saran-Saran	95
C. Penutup	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Distribusi penduduk Kelurahan Ketapang	48
Tabel 3.2 Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kelurahan Ketapang ..	49
Tabel 3.3 Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan di Kelurahan Ketapang	50
Tabel 3.4 Penduduk Berdasarkan Pendidikan Akhir di Kelurahan Ketapang ..	50
Tabel 3.5 Sebaran Fasilitas Pendidikan di Kelurahan Ketapang	52
Tabel 3.6 Sarana Peribadatan, Kesehatan, Rekreasi dan Olah Raga di Kelurahan Ketapang	53
Tabel 3.7 Kegiatan Kelembagaan Sosial Budaya di Kelurahan Ketapang	53
Tabel 3.8 Sebaran Sarana Perekonomian di Kelurahan Ketapang	54
Tabel 3.9 Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Ketapang	56
Tabel 3.10 Peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)	61
Tabel 3.11 Data Penduduk Miskin Kelurahan Ketapang	64
Tabel 3.12 Daftar Nama Peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kelurahan Ketapang	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Wilayah Kelurahan Ketapang	48
Gambar 3.2 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)	71

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dihadapi oleh seluruh pemerintah yang ada di dunia ini. Kemiskinan adalah kurangnya kesejahteraan. Pendapat konvensional mengaitkan kesejahteraan terutama dengan kepemilikan barang, sehingga masyarakat miskin diartikan sebagai mereka yang tidak memiliki pendapatan atau konsumsi yang memadai untuk membuat mereka berada diatas ambang minimal kategori sejahtera. Kemiskinan juga dapat dikaitkan dengan suatu jenis konsumsi tertentu. Sebagai contoh, suatu masyarakat dapat saja dikatakan miskin karena tidak memiliki tempat tinggal, kekurangan pangan, atau memiliki kondisi yang kurang baik.² Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir ditengah-tengah masyarakat, khususnya dinegara-negara berkembang.³

Indonesia adalah negara yang masih menghadapi problema kemiskinan akut. Media Indonesia menyajikan hasil survei terhadap 480 responden yang diambil secara acak dari daftar pemilik telepon enam kota besar di Indonesia (Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Medan dan Makassar). Responden ditanya sebagaimana pendapatannya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari saat ini, apakah dirasakan semakin berat atau ringan. Mayoritas responden (73%) merasakan bahwa pemenuhan kebutuhan sehari-hari semakin berat; sebanyak 21 persen responden merasakan sama saja; dan hanya 6 persen yang merasakan semakin ringan. Dengan demikian, berdasarkan garis kemiskinan (*poverty line*) rendahnya peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan manusia Indonesia masih

² Jonathan Haughton dan Shahidur R. Khandker, *Pedoman tentang Kemiskinan dan Ketimpangan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hlm. 1.

³ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hlm. 131.

berada di tingkat bawah. Bahkan, karena indikator IPM pada hakekatnya merujuk pada konsep kemampuan dasar manusia, dapat dikatakan bahwa kemampuan masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar saja ternyata masih di ragukan. Dengan kata lain, hidup belum berkecukupan, masyarakat Indonesia masih belum bisa terbebas dari lilitan kemiskinan.⁴ Realita yang tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia sebagai salah satu negara yang berpenduduk kurang lebih berjumlah 237 juta penduduk masih terlampau banyak penduduk Indonesia yang hidup dibawah kondisi kurang mendapatkan keberuntungan (miskin).⁵

Menurut BAPPENAS indikator utama kemiskinan suatu wilayah dapat dilihat sebagai berikut: 1.) Kurangnya pangan, sandang dan perumahan yang tidak layak, 2.) Terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif, 3.) Kurangnya kemampuan membaca dan menulis, 4.) Kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup, 5.) Kerentanan jaminan dan kesejahteraan hidup, 6.) Kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi, 7.) Ketidakberdayaan atau daya tawar yang rendah, 8.) Akses terhadap ilmu pengetahuan yang terbatas. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Dari sisi makanan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan indikator yang direkomendasikan oleh Widyakara Pangan dan Gizi tahun 1998 yaitu kebutuhan gizi 2.100 kalori per orang per hari, sedangkan dari sisi kebutuhan non makanan tidak hanya terbatas pada sandang dan papan melainkan termasuk pendidikan dan kesehatan.⁶

Penyebab terciptanya keluarga miskin, terdapat beberapa faktor internal yang ada pada keluarga miskin antara lain: rendahnya pendidikan, rendahnya keterampilan mereka, keterbatasan wawasan, rendahnya motivasi hidup

⁴ Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 19- 21.

⁵ Qi Mangku Bahjatulloh, *Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kegiatan Filantropi*, Vol. 10, No. 2, Desember, 2016, hlm. 474- 475.

⁶ Yovinda Rizki Amelia, *Model Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (Tahun 2010-2016)*, dalam Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017, hlm. 24- 25.

mereka, rendahnya kemauan untuk mengembangkan diri dan sebagainya. Faktor internal inilah yang sebenarnya merupakan faktor yang perlu mendapat perhatian yang besar di dalam meningkatkan ekonomi keluarga, sehingga dapat membantu mencukupi kebutuhan keluarga.⁷ Melihat keluarga sebagai suatu sistem yang anggotanya saling berinteraksi dan mempunyai saling ketergantungan satu dengan yang lainnya. Karena itu, masalah yang dihadapi oleh individu biasanya dipengaruhi oleh dinamika yang ada dikeluarga mereka. Sebagai konsekuensinya, perubahan pada suatu anggota keluarga akan mempengaruhi anggota keluarga lainnya dalam peningkatan ekonomi.⁸

Permasalahan ekonomi muncul pada saat kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya atau faktor produksi yang terbatas. Masalah pokok perekonomian yaitu terbatasnya alat pemuas kebutuhan padahal kebutuhan manusia tidak terbatas sehingga adanya ketidak seimbangan antara kebutuhan manusia tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas.⁹ Permasalahan ekonomi terbagi menjadi dua yaitu masalah ekonomi mikro dan masalah ekonomi makro. Dalam ekonomi mikro permasalahan ekonomi yang terjadi diantaranya masalah penentuan harga dasar dan harga tertinggi, mekanisme harga pasar, masalah distribusi dan lain-lain. Sedangkan masalah ekonomi makro diantaranya inflasi, kemiskinan, pengangguran, pemberdayaan ekonomi dan lain-lain. Dalam permasalahan ekonomi makro ini menjadi permasalahan yang krusial.¹⁰

Perkembangan kebutuhan masyarakat, kembali sebagai kewajiban moral ingin menunjukkan ketaatan kepada ajaran agama Islam untuk membantu orang yang kurang mampu/ orang miskin.¹¹ Media ekonomi merupakan media perbuatan atau akhlak sosial yang berdimensi kemanusiaan

⁷ Agus Sjafari, *Kemiskinan Dan Pemberdayaan Kelompok*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 2.

⁸ Adi Ishandi Rukminto, *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Jakarta: Fisip UI Press, 2003), hlm. 145.

⁹ Imamul Arifin, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, (Bandung: PT. Setia Purna Inves, 2007), hlm. 10.

¹⁰ Aang Curatman, *Teori Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: Swagati Press, 2010), hlm. 2.

¹¹ Azyumardi Azra, *Berderma Untuk Semua Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, (Jakarta: Penerbit Teraju, 2003), hal. 41- 206.

atau sering disebut dengan dakwah *bil-hal*. Dakwah *bil-hal* adalah dakwah yang disampaikan dengan (mengutamakan) perbuatan. Dakwah *bil-hal* dalam bidang ekonomi berarti dakwah melalui perbuatan nyata untuk keperluan kepentingan peningkatan ekonomi umat.¹²

Perubahan yang direncanakan, terutama dalam bentuk kebijakan dan program pembangunan, sudah banyak dilakukan baik oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Oleh sebab itu pembangunan masyarakat adalah proses untuk menuju pada suatu kondisi di mana semakin banyak kebutuhan dapat terpenuhi.¹³ Adanya identifikasi inilah yang kemudian mendorong dilakukannya kegiatan untuk melaksanakan program guna memecahkannya.¹⁴

Untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut, pada tahun 2002 pemerintah Indonesia mencanangkan salah satu program yaitu beras miskin (Raskin). Raskin merupakan program dari pemerintah berupa bantuan beras bersubsidi untuk membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah. Pada tahun 2015 Raskin berganti nama menjadi Rastra (Beras Sejahtera), Rastra merupakan program yang sama dengan Raskin hanya yang membedakan sebutan untuk program tersebut. DPR-RI (2015) menjelaskan bahwa istilah sebelumnya kata beras miskin (Raskin) dianggap kurang sopan untuk didengar, maka diubah menjadi beras sejahtera (Rastra), tetapi perubahan istilah tersebut tetap memiliki tujuan yang sama.¹⁵

Program Rastra kini berganti nama menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pengalihan itu, lebih mempermudah mencapai 6T dari pada program Rastra. 6T yang di maksud ialah Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, Tepat Harga, dan Tepat Administrasi. BPNT merupakan

¹²Siti Prihatiningtyas, *Pemikiran Dakwah Mr. Sjafruddin Prawiranegara di Bidang Ekonomi*, (IAIN Walisongo Semarang: Anggaran DIPA-BLU, 2011), hal. 33-34.

¹³ Soetomo, *Keswadayaan Masyarakat Manifestasi Kapasitas Masyarakat untuk Berkembang Secara Mandiri*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 117- 118.

¹⁴ Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 319.

¹⁵ Megayana Masta, *Implementasi Distribusi Beras Sejahtera (RASTRA) di Desa Tanjung Jati Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus*, dalam Skripsi, Universitas Bandar Lampung, 2016, hlm. 2.

bantuan pangan dari pemerintah yang di berikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di e-WarongKUBE/ pedagang bahan pangan yang bekerja sama dengan Bank HIMBARA. Program BPNT bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.¹⁶Program bantuan pangan non-tunai (BPNT) merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).¹⁷

Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal merupakan salah satu Kelurahan yang mempunyai jumlah keluarga miskin yang cukup banyak. Terdapat 118 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebar di 8 RW yang nantinya mendapatkan bantuan. Kelurahan Ketapang merupakan salah satu Kelurahan yang melaksanakan Program Bantuan Pangan Non Tunai. Program BPNT di Kelurahan Ketapang mulai dilaksanakan pada bulan Juli 2018. Bantuan Pangan Non Tunai diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah terdata, nama-nama yang terdata dapat mendapatkan kartu ATM berwarna merah dengan syarat mengikuti sosialisasi di balai desa, mengumpulkan fotocopy KK dan fotocopy KTP, setelah itu kartu dapat diambil di Kecamatan Kendal. Keluarga penerima manfaat (KPM) dapat menerima uang sebesar Rp 110.000,- per bulan melalui sebuah kartu yang diterima. Kartu tersebut dapat dibelanjakan barang-barang sembako beras dan telur di e-Warung KUBE. e-Warung KUBE singkatan dari Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama merupakan warung penjual sembako/bahan pangan yang bekerja sama dengan Bank BTN. Program BPNT

¹⁶<http://layanansosial.blogspot.com/2018/02/pengertian-tujuan-dan-manfaat-bpnt.html>, diakses pada 21 Oktober 2018, 10. 10.

¹⁷ Ahmad Syauqi, *Efektivitas Kinerja Pelaksanaan Program Beras Miskin di Kota Banjarmasin*, Vol. 1, No. 2, Juli- Desember, 2011, hlm. 3- 4.

juga memberikan kreatifitas kepada pendamping agar anggotanya menjadi mandiri dengan mendorong peserta KPM untuk melakukan kegiatan produktif yang dapat menghasilkan nilai tambah seperti kelompok Usaha Bersama (KUBE), Usaha ekonomi produktif.¹⁸Dengan adanya program Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Ketapang diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan membantu mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan harapan mereka dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan sementara, menunjukkan bahwa implementasi program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Kelurahan Ketapang belum berjalan dengan baik seperti yang diharapkan. Sebagai contoh dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Ibu Jamsiyah menyatakan bahwa pendataan penerima bantuan yang kurang sesuai sehingga masih terdapat kecemburuan sosial. Akan tetapi pelaksanaan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sangat membantu meringankan beban kebutuhan hidup keluarga bagi penerima bantuan.²⁰Hal itu juga dirasakan oleh Ibu Saminem, dalam Pelaksanaan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) menegaskan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menyatakan puas terhadap pelaksanaan program tersebut dibandingkan program sebelumnya. Sejumlah indikator menunjukkan bahwa proses BPNT saat ini mudah dan memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM sehingga memberikan manfaat positif. Akan tetapi dalam pelaksanaan program BPNT di Kelurahan Ketapang masih terdapat ketepatan sasaran yang masih kurang tepat, keluarga yang seharusnya mendapatkan bantuan masih ada yang belum terdata.²¹Dari penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk lebih lanjut meneliti mengenai **“Implementasi Program Bantuan Pangan Non-**

¹⁸Wawancara dengan Ibu Rukatun, selaku pendamping program BPNT Kelurahan Ketapang, pada tanggal 19/1/2019, pukul 10.00 WIB.

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Munarsih, penerima program BPNT Kelurahan Ketapang, pada tanggal 19/1/2019, pukul 09.10 WIB.

²⁰ Wawancara dengan Ibu Jamsiyah, penerima program BPNT Kelurahan Ketapang, pada tanggal 22/7/2019, pukul 10.10 WIB.

²¹ Wawancara dengan Ibu Saminem, penerima program BPNT Kelurahan Ketapang, pada tanggal 15/6/2019, pukul 08.30 WIB.

Tunai (BPNT) Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Miskin Di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul skripsi dan latar belakang masalah tersebut, maka ada beberapa permasalahan yang akan ditekankan pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi program bantuan pangan non-tunai (BPNT) dalam peningkatan ekonomi keluarga miskin di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana hasil yang telah di capai melalui implementasi program bantuan pangan non-tunai (BPNT) dalam peningkatan ekonomi keluarga miskin di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi program bantuan pangan non-tunai (BPNT) dalam peningkatan ekonomi keluarga miskin di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.
2. Untuk mengetahui hasil yang telah di capai melalui implementasi program bantuan pangan non-tunai (BPNT) dalam peningkatan ekonomi keluarga miskin di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat dijelaskan beberapa manfaat dari pelaksanaan penelitian masalah tersebut sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam kaitannya implementasi program bantuan pangan non-tunai (BPNT) dalam peningkatan ekonomi keluarga miskin di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi para pembaca, dan memberikan kontribusi masukan positif dan manfaat

bagi penulis,serta bagi pemerintah khususnya pada bidang pelaksanaan program BPNT untuk menjadi bahan masukan pada perbaikan pelaksanaan implementasi program bantuan pangan non-tunai (BPNT) dalam peningkatan ekonomi keluarga miskin di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan judul penelitian ini, terdapat beberapa kajian yang telah dilakukan oleh peneliti lain yang relevan dengan peneliti lain. Oleh karena itu dibawah ini akan dikemukakan beberapa kajian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebagai berikut:

Pertama, Skripsi dari Nurul Aini, 2018, yang berjudul “ *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung*”.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan agar dapat memperoleh informasi yang mendalam tentang program kemiskinan dan pemberdayaan. Subyek dalam penelitian ini terdiri dari Pendamping PKH, dan anggota PKH di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah metode observasi, interview, dan dokumentasi. Tehnik sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yang berjumlah lima orang informan yang terdiri dari satu orang pendamping dan empat orang anggota PKH, yang menjadi sasaran dalam PKH adalah masyarakat yang tinggal di Kelurahan Way Dadi memiliki kriteria miskin, yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Hasil penelitian ini diketahui bahwa PKH Way Dadi melalui kegiatan, dimana dalam program memiliki komponen yang harus saling berkaitan antara satu dengan yang lain, baik itu input, proses, output yaitu perubahan perilaku KPM menjadi lebih mandiri dan outcome berhasil menurunkan angka kemiskinan yang ada di Way Dadi.²² Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan

²² Nurul Aini, “*Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung*”, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018, hlm. ii.

peneliti yaitu penelitian ini lebih terfokus pada proses kegiatan implementasi bantuan pangan non-tunai (BPNT). Perbedaan ini selain pada fokus penelitian, berbeda pula tempat penelitian dan juga objek kajian.

Kedua, Skripsi dari MegayanaMasta, 2016, yang berjudul “*Implementasi Distribusi Beras Sejahtera (RASTRA) di Desa Tanjung Jati Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian fenomenologi. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka diperoleh hasil bahwa implementasi distribusi Rastra di Desa Tanjung Jati secara umum belum sepenuhnya mengacu kepada ketentuan 6T, karena keenam indikator belum sepenuhnya tepat, dimulai dengan ketepatan sasaran yang masih kurang tepat karena pemerataan, ketepatan jumlah karena dilakukan pemerataan maka mengurangi jumlah, ketepatan harga tidak sesuai dengan yang telah ditentukan pemerintah, ketepatan waktu masih sering terjadi keterlambatan pendistribusian dalam setiap bulannya, ketepatan kualitas masih banyak mutu beras yang berbau, pecah-pecah dan berwarna, ketepatan administrasi belumterpenuhinya semua prosedur administrasi.²³Skripsi ini tentu berbeda dengan skripsi penulis.Perbedaan ini selain pada objek kajian, tempat penelitian dan juga fokus penelitian.

Ketiga, Skripsi dari MisraYetti, 2011, yang berjudul “*Pendistribusian Beras Miskin (RASKIN) di Kelurahan Teluk Merbau Menurut Perspektif Ekonomi Islam*”.Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.Metode pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan angket. Sementara teknik analisa data adalah analisis data kualitatif, yaitu dengan jalan mengklasifikasikan data-data yang akan dikumpulkan di lapangan berdasarkan persamaan jenis. Hasil penelitian ini, bahwa Pendistribusian Raskin kepada masyarakat kurang mampu di

²³ Megayana Masta, *Implementasi Distribusi Beras Sejahtera (RASTRA) di Desa Tanjung Jati Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus*, dalam Skripsi, Universitas Bandar Lampung, 2016, hlm. 3.

Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, dilihat dari dua aspek, yaitu pelaksanaan pendistribusian dan standar masyarakat kurang mampu yang mendapatkan bantuan Raskin. Adapun dalam sisi pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada masyarakat miskin di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, terlihat dari sisi pendistribusian tidak merata, besarnya bantuan yang diberikan dan pendistribusian yang tidak gratis.²⁴ Pada penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu pada penelitian ini akan berfokus pada implementasi program bantuan pangan non-tunai (BPNT) dalam peningkatan ekonomi keluarga miskin. Selain itu berbeda pula objek kajian dan tempat peneliti.

Keempat, Skripsi dari EkomanSuryadi, 2016, yang berjudul *“Implementasi Program Beras Miskin (RASKIN) Tahun 2015 di Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu”*. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tahapan yang peneliti lakukan dalam penelitian kualitatif itu adalah Mengangkat permasalahan, Memunculkan pertanyaan penelitian, Mengumpulkan data yang relevan, Melakukan analisis data, Menjawab pertanyaan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Pringsewu Barat Tahun 2015 belum berjalan dengan baik seperti yang diharapkan, hal ini dikarenakan indikator keberhasilan raskin 5T yakni tepat jumlah, harga, kualitas, sasaran, dan waktu belum sepenuhnya tercapai. Aspek-aspek yang sangat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yang dikemukakan dalam model implementasi Edward III seperti komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam implementasi program raskin belum berjalan optimal sehingga masih ditemukan kendala atau hambatan dalam implementasi program raskin di Kelurahan

²⁴Misra Yetti, *“Pendistribusian Beras Miskin (RASKIN) di Kelurahan Teluk Merbau Menurut Perspektif Ekonomi Islam”*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2011, hlm. v.

PringsewuBarat.²⁵Pada penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang akandilakukan peneliti yaitu tahun pelaksanaan penelitian, yang mana nama Raskin sudah di ganti dengan nama bantuan pangan non-tunai (BPNT).

Kelima, Skripsi dari HijriatulMabruk, 2016, yang berjudul *“Implementasi Program Beras Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang”*.Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel sebanyak 263 responden, dengan menggunakan rumus Slovin.Metode penelitian untuk mengoprasionalisasikan variabel penelitian yaitu pendekatan kuantitatif deskriptif.Hasil pengamatan yang dilakukan bahwa fenomena pelaksanaan program Raskin untuk tahun anggaran 2014 di Kecamatan Neglasari, dalam pelaksanaannya masih ditemui berbagai kendala- kendala dari masyarakat bahkan dari aparaturnya sendiri.Kelancaran penyaluran Raskin sangat bergantung dari disiplin seluruh pelaku yang terlibat. Dari pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa Implementasi Program Beras Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang mencapai angka 75, 31% dari yang diharapkan dari hipotesis sebelumnya peneliti berasumsi paling tinggi 70%. Hal ini membuktikan bahwa kinerja para pembuat dan pelaksana kebijakan program beras rumah tangga miskin bekerja maksimal karena mengingat untuk mensejahterakan warga miskin itu sangatlah susah, yang mana memang mayoritas penduduk secara umum berada di bawah garis kemiskinan.²⁶Pada penelitian ini terdapat perbedaan dengan peneliti yaitu jenis penelitian.Berbeda pula pada objek kajian, tempat penelitian dan juga fokus penelitian.

Keenam, Skripsi dari Frida Nur Rizkia, 2017, yang berjudul *“Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Melalui Program P2WKSS Di Sumber Gamol, Balecatur, Gamping, Sleman”*.Penelitian ini

²⁵Ekoman Suryadi, *“Implementasi Program Beras Miskin (RASKIN) Tahun 2015 di Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu”*, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016.

²⁶Hijriatul Mabruk, *“Implementasi Program Beras Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang”*, Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2016, hlm. v.

merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Informan utama dalam penelitian ini adalah 6 perempuan penerima program P2WKSS dengan ketentuan ibu rumah tangga yang penghasilannya meningkat setelah adanya program P2WKSS yang tidak bekerja di pabrik sebagai karyawan. Informan berjumlah 6 orang didasarkan pada teknik pengambilan sampel dengan mempertimbangkan sesuatu hal yang disebut *purposive sampling*. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan analisis data model Miles and Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) peran perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga melalui program P2WKSS adalah melakukan kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan rumah tangga, pemberdayaan yang diikuti perempuan, dukungan keluarga terhadap program P2WKSS dan pembagian waktu kaitannya dengan peran ganda, (2) sumbangan pendapatan perempuan penerima program P2WKSS sangat berkontribusi dalam kehidupan ekonomi keluarga. Kontribusi yang mereka berikan berupa uang dari upah pekerjaannya yang digunakan untuk membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan keluarga.²⁷ Pada penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu lebih fokus pada pelaksanaan program bantuan pangan non-tunai (BPNT) yang pelaksanaannya dilakukan di Kelurahan Ketapang.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas terkait penelitian implementasi program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), yang mana dilakukan di tempat yang berbeda dan fokus yang berbeda. Akan tetapi disini peneliti akan lebih fokus untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan implementasi program bantuan pangan non-tunai (BPNT) dalam meningkatkan ekonomi keluarga miskin. memahami serta mendeskripsikan keadaan sebenarnya di lapangan secara rinci dan aktual tentang praktik implementasi program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Oleh karena itu peneliti mengambil judul tentang *Implementasi Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Dalam*

²⁷ Frida Nur Rizkia, "Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Melalui Program P2WKSS Di Sumber Gamol, Balecat, Gamping, Sleman", Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2017, hlm. 3.

Peningkatan Ekonomi Keluarga Miskin Di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dilaksanakan seorang peneliti untuk mengumpulkan, mengklarifikasi dan menganalisis fakta yang ada di tempat penelitian dengan menggunakan ukuran-ukuran dalam pengetahuan, hal ini dilakukan untuk menemukan kebenaran.²⁸Pada dasarnya metode penelitian berfungsi untuk membantu peneliti dalam memberikan suatu penafsiran terhadap suatu hal yang bersifat nyata dan akurat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan sebagai metode alamiah. Jenis penelitian kualitatif adalah metode penelitian dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dalam sebuah penelitian. Data yang dihasilkan dalam penelitian kualitatif ini tidak memerlukan analisis statistik (perhitungan) seperti yang ada dalam penelitian kuantitatif.

Penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Disebut Penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini lebih menekankan analisisnya pada hubungan penyimpulan deduktif dan induktif, serta pada analisa terdapat dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan

²⁸ Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2010), hlm. 13.

menggunakan logika ilmiah.²⁹Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif karena data-data yang disajikan berupa pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan bagaimana kondisi implementasi program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dalam peningkatan ekonomi keluarga miskin di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan sosiologi yang bertujuan untuk menggambarkan gejala-gejala masalah sosial masyarakat dan mengumpulkan data atau informasi yang disusun dan dijelaskan serta dianalisis.³⁰Penulis mendefinisikan suatu pendekatan penelitian untuk memaparkan fenomena alamiah yang terjadi berdasarkan teori yang ada. Oleh karena itu, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk memaparkan dan mendeskripsikan tentang implementasi program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dalam peningkatan ekonomi keluarga miskin di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.³¹Adapun data primer dalam penelitian ini yaitu lurah, pendamping program bantuan pangan non-tunai serta masyarakat penerima bantuan pangan non-

²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 11- 14.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 137.

³¹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2011), hlm. 100.

tunai (BPNT) di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain. Tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.³²Sumber data ini diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan dan publikasi yang telah tersedia, yaitu Sumber data berupa dokumen laporan-laporan, buku-buku, jurnal penelitian dan sebagainya yang berkaitan dengan implementasi program bantuan pangan non-tunai (BPNT) dalam peningkatan ekonomi keluarga miskin di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

a. Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik pencarian data atau informasi mendalam yang diajukan kepada informan dalam bentuk pertanyaan lisan, teknik ini sangat diperlukan dan sangat penting untuk mengungkap bagian terdalam (tersembunyi) yang tidak dapat terungkap lewat angket. Alat yang digunakan dalam teknik ini bisa berupa recorder, panduan wawancara, dan catatan penelitian. Jadi, wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan oleh pewawancara dan jawaban-jawaban informan dicatat atau direkam dengan alat perekam.³³

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara bebas tanpa terikat oleh pertanyaan tertulis tetapi masih dalam cakupan pembahasan penelitian. Hal ini dimaksud agar wawancara lebih terbuka. Wawancara ini sesuai

³² Mahi Hikmat, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 83.

³³ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 67.

dengan perumusan masalah yang diambil, maka penulis mengadakan wawancara yang mendalam dengan narasumber. Narasumber dalam wawancara ini yaitu 1.) lurah, 2.) pendamping program bantuan pangan non-tunai, 3.) penerima bantuan pangan non-tunai (BPNT) di Kelurahan Ketapang Kabupaten Kendal.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan mengamati dan mencermati serta melakukan pencatatan data atau informasi yang sesuai dengan konteks penelitian.³⁴ Teknik observasi diharapkan dapat menjelaskan atau menggambarkan secara luas dan rinci tentang masalah yang dihadapi, karena data observasi berupa deskripsi yang faktual, cermat dan terinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia, dan sistem sosial, serta konteks tempat kegiatan itu terjadi. Dalam observasi penelitian ini, peneliti tidak termasuk dalam anggota obyek penelitian, peneliti hanya sebagai pengamat untuk memperoleh data lengkap, pengamatan ini dilakukan pada kegiatan implementasi program bantuan pangan non-tunai (BPNT) dalam peningkatan ekonomi keluarga miskin di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi, yakni penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data tertulis yang telah tersedia. Dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Dalam sebuah penelitian dokumen menjadi penting karena melalui dokumen peneliti dapat menimba pengetahuan bila dianalisis dengan cermat.³⁵ Kelebihan teknik dokumentasi ini karena data tersedia, siap pakai, serta hemat biaya dan tenaga, hal ini juga sangat membantu peneliti dalam mengumpulkan data yang kongkrit untuk memperoleh

³⁴ S, Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 37.

³⁵ Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 161.

informasi-informasi, dokumentasi bisa tertulis maupun lainnya yang bisa memberikan informasi tentang pelaksanaan program bantuan pangan non-tunai (BPNT) di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.

4. Keabsahan Data

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih sempurna perlu dilakukan keabsahan data. Peneliti memilih teknik keabsahan data yang sesuai dengan konteks penelitian dan pernah dilakukan oleh peneliti dalam rangka penyempurnaan hasil penelitian. Teknik yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi. Triangulasi adalah suatu pendekatan riset yang memakai suatu kombinasi lebih dari satu strategis dalam suatu penelitian untuk menjaring data/informasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari beberapa sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan teknik waktu sebagai berikut:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara pengecekan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dari beberapa sumber dideskripsikan, dikategorisasikan mana pandangan yang sama, yang berbeda dan mana yang spesifik dari beberapa sumber tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan beberapa sumber tersebut.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang

berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

c. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering memengaruhi kredibilitas data. Data yang dilakukan dengan teknik wawancara di pagi hari disaat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam situasi yang berbeda. Bila hasil uji mendapatkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

Dalam riset kualitatif triangulasi menjadi sesuatu yang sangat penting untuk membantu pengamatan menjadi lebih jelas sehingga informasi yang diperlukan menjadi lebih jernih. Triangulasi di atas adalah cara peneliti dalam melakukan analisis data dengan menggunakan triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dari para informan yang dituju dan triangulasi teknik dilakukan dengan mengkroscek/ mengecek data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yaitu wawancara lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit- unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang

lain. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaksi yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan setelah masa pengumpulan data yaitu: reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan/ verifikasi.³⁶

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, yang memfokuskan pada hal-hal penting yang sesuai dengan tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, tabel, grafik dan sejenisnya. Dengan demikian akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. *Conclusion* (Kesimpulan)

Kesimpulan dari penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa kausal, interaktif, hipotesis atau teori.³⁷

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif yaitu dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah seluruh data serta menafsirkannya dengan analisis sesuai dengan kemampuan nalar peneliti untuk membuat kesimpulan

³⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 244-245.

³⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 245-253.

penelitian mengenai implementasi program bantuan pangan non-tunai (BPNT) dalam peningkatan ekonomi keluarga miskin di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan gambaran dan pemahaman yang sistematis, maka penulisan dalam skripsi ini terbagi dalam beberapa bab, sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan. Bagian ini meliputi beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, teknik pengumpulan data dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II. Landasan teori. Bab ini merupakan bagian yang mencakup landasan teori dari skripsi. Pertama kajian tentang implementasi, meliputi: pengertian implementasi, tahap-tahap dalam proses implementasi, faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi, kedua kajian tentang kemiskinan, meliputi: pengertian kemiskinan, faktor kemiskinan, ketiga kajian teori tentang program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), meliputi: pengertian program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), landasan pelaksanaan BPNT, pengukuran keberhasilan program BPNT, dan indikator penerima program BPNT, keempat kajian tentang ekonomi keluarga, meliputi: pengertian ekonomi keluarga dan aspek-aspek dalam ekonomi keluarga.

BAB III. Pada bab ini membahas tentang kajian objek penelitian yang terdiri dari tiga sub bab yaitu pertama gambaran umum yang meliputi: Profil Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal meliputi letak geografis dan batas administratif, kondisi demografi, keadaan sosial ekonomi penduduk serta struktur organisasi kepengurusan Kelurahan Ketapang. Kemudian sub yang kedua tentang implementasi program bantuan pangan non-tunai (BPNT) dalam peningkatan ekonomi keluarga miskin di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, dan sub ketiga membahas tentang hasil yang telah di capai melalui implementasi program bantuan

pangan non-tunai (BPNT) dalam peningkatan ekonomi keluarga miskin di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.

BAB IV. Berisi tentang analisis penelitian yang mana terdiri dari dua sub bab yaitu analisis implementasi program bantuan pangan non-tunai (BPNT) dalam peningkatan ekonomi keluarga miskin di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, kemudian sub bab yang kedua tentang analisis hasil yang telah di capai melalui implementasi program bantuan pangan non-tunai (BPNT) dalam peningkatan ekonomi keluarga miskin di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.

BAB V. Berisi kesimpulan, saran- saran dan penutup. Penulis menyimpulkan tulisan pada bab- bab sebelumnya mengenai implementasi program bantuan pangan non-tunai (BPNT) dalam peningkatan ekonomi keluarga miskin di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal

BAB 11

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Dilihat dari sudut pandang pusat, maka fokus analisis implementasi kebijakan itu akan mencakup usaha- usaha yang dilakukan oleh pejabat- pejabat atasan atau lembaga-lembaga di tingkat pusat untuk mendapatkan keputusan dari lembaga-lembaga atau pejabat-pejabat tingkat yang lebih rendah/ daerah, dalam upaya mereka memberikan pelayanan atau mengubah perilaku masyarakat/ kelompok sasaran dari program yang bersangkutan.

Dalam arti seluas- luasnya, implementasi sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang- undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara beragam pemangku kepentingan (*stakeholders*), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur, dan teknik secara sinergistis yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki. Rasionalitas atau alasan di balik langkah seperti ini tak lain dimaksudkan agar sikap, perilaku, dan pikiran dari semua pemangku kepentingan yang terlibat dapat lebih terkontrol serta tetap terjaga pada relnya. Dengan demikian, tujuan dan sasaran program atau kebijakan itu secara keseluruhan dapat dicapai secara memuaskan.

Van Meter dan Van Hommerumuskan proses implementasi sebagai “ *those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objective set fort in prior policy decision*” (tindakan- tindakan yang dilakukan baik oleh individual/ pejabat- pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan

pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan).

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa, “Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/ dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.”

Berdasarkan pandangan yang diutarakan oleh kedua ahli di atas, dapat kita simpulkan bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan-jaringan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat memengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat. Akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan (*intended*) maupun yang tidak diharapkan (*spillover/ negative effects*).

Mazmanian dan Sabatier telah merumuskan proses implementasi kebijakan ini dengan lebih rinci, yaitu: “implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun, dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian *output* kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksana, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran,

dampak nyata yang dikehendaki atau yang tidak dikehendaki dari *output* tersebut dampak keputusan sebagaimana dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan- perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang/ peraturan yang bersangkutan).³⁸Mengimplementasikan kebijakan menurut Charles O. Jones adalah proses mewujudkan program sehingga memperlihatkan hasilnya.³⁹

Berdasarkan beberapa pendapat diatas yang mendefinisikan implementasi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian implementasi adalah tindakan, aktivitas, suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individuatau kelompok), proses tersebut dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.

b. Tahap- tahap dalam proses Implementasi

Untuk memperjelas persoalan proses Implementasi harus ditinjau menurut tahapan-tahapannya, yaitu:

- 1) *Output- output* kebijakan (keputusan- keputusan) dari badan- badan pelaksana.
- 2) kepatuhan kelompok-kelompok sasaran terhadap keputusan tersebut.
- 3) Dampak nyata keputusan- keputusan badan-badan pelaksana.
- 4) Persepsi terhadap dampak keputusan-keputusan tersebut.
- 5) Evaluasi sistem politik terhadap undang-undang, baik berupa perbaikan- perbaikan mendasar atau upaya untuk melaksanakan perbaikan dalam muatan/ isinya.

Semua tahapan diatas seringkali digabung menjadi satu di bawah pokok bahasan mekanisme umpan balik. Namun, di sini terdapat dua proses yang terpisah. Jika seseorang hanya tertarik pada persoalan sejauh

³⁸ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 131- 140.

³⁹ M. Irfan Islamy, *Kebijakan Publik*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014), hal. 6.

mana dampak nyata suatu implementasi program sejalan dengan tujuan-tujuan program, maka yang penting diperhatikan hanya tiga tahap yang disebutkan pertama. Kendatipun demikian, ada baiknya jika diperhatikan pula evaluasi yang dilakukan oleh sistem politik terhadap undang-undang atau kebijakan itu, yang tercakup dalam tahap yang disebut terakhir.

Masing-masing tahap tersebut dapat disebut sebagai titik akhir (*end point*) atau variabel tergantung. Masing-masing tahap itu juga merupakan *input* bagi keberhasilan tahap yang lain. Kepatuhan kelompok sasaran terhadap keputusan-keputusan kebijakan badan-badan pelaksana jelas akan memengaruhi dampak nyata keputusan-keputusan dari badan-badan pelaksana itu jelas merupakan variabel kunci yang memengaruhi revisi ataupun upaya untuk merevisi undang-undang.⁴⁰

c. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Proses Implementasi

Dalam studi kebijakan publik terdapat banyak model implementasi, diantaranya model implementasi kebijakan publik Van Meter, Erward III, Grindle, dan Mazmanian dan Sabatier. Model Erward mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau keberhasilan implementasi kebijakan. Empat variabel atau faktor tadi antara lain meliputi variabel atau faktor *communication, resources, dispositions, dan bureaucratic structure*.

1) Faktor Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat

⁴⁰Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 203- 204.

mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

2) Sumber Daya (*Resources*)

Faktor sumber daya mempunyai peran yang penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, dan sumber daya informasi dan kewenangan.

a) Sumber daya manusia

Edward III menegaskan bahwa sumber daya manusia (staff), harus cukup (jumlah) dan cakap (keahliannya). Dengan demikian sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan disamping harus cukup juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan (pemimpin). Sumber daya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staff yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang ditangani.

b) Sumber daya anggaran

Sumber daya yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan, selain sumber daya manusia adalah dana dan peralatan yang diperlukan untuk membiayai operasionalisasi pelaksanaan kebijakan. Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan pada publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas.

c) Sumber daya peralatan

Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sasaran yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

d) Sumber daya informasi dan kewenangan

Sumber daya informasi menjadi faktor yang penting dalam implementasi kebijakan publik. Informasi yang dimaksud yaitu informasi relevan dan cukup berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. Kewenangan juga merupakan sumber daya yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Kewenangan yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini penting kehadirannya ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan.

3) Disposisi (*Dispositions*)

Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

4) Struktur Birokrasi (*Bureaucratic structure*)

Implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena adanya ketidak efisien struktur birokrasi. Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Oleh karena itu, struktur birokrasi mencakup dimensi standar prosedur operasi yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya.⁴¹

⁴¹ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, (Sidoarjo: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 96-106.

2. Kemiskinan

a. Pengertian kemiskinan

Kemiskinan diartikan sebagai keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.⁴² Tipologi kemiskinan dapat dikategorikan pada empat kategori, yakni kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural.

Pertama, kemiskinan absolut adalah keadaan miskin yang diakibatkan oleh ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti untuk makan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi, dll. Penentuan kemiskinan absolut ini biasanya diukur melalui ‘batas kemiskinan’ atau ‘garis kemiskinan’ (*poverty line*) baik yang berupa indikator tunggal maupun komposit, seperti nutrisi, kalori, beras, pendapatan, pengeluaran, kebutuhan dasar, atau kombinasi beberapa indikator. Untuk mempermudah pengukuran, indikator tersebut umumnya dikonversikan dalam bentuk uang (pendapatan atau pengeluaran). Dengan demikian, seseorang atau sekelompok orang yang kemampuan ekonominya berada dibawah garis kemiskinan, dikategorikan sebagai miskin secara absolut.

Kedua, kemiskinan relatif adalah keadaan miskin yang dialami individu atau kelompok dibandingkan dengan ‘kondisi umum’ suatu masyarakat. Jika batas kemiskinan misalnya Rp. 100.000 per kapita per bulan, maka seseorang yang memiliki pendapatan Rp. 125.000 per bulan secara absolut tidak miskin, tetapi jika pendapatan rata-rata masyarakat setempat adalah Rp. 200.000 per orang per bulan, maka secara relatif orang tersebut termasuk orang miskin.

Ketiga, kemiskinan kultural mengacu pada sikap, gaya hidup, nilai, orientasi sosial budaya seseorang atau masyarakat yang tidak

⁴² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 319.

sejalan dengan etos kemajuan (masyarakat modern). Sikap malas, tidak memiliki kebutuhan berprestasi (*needs for achievement*), fatalis, berorientasi ke masa lalu, tidak memiliki jiwa kewirausahaan adalah beberapa karakteristik yang umumnya dianggap sebagai ciri- ciri kemiskinan kultural.

Keempat, kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh ketidakberesan atau ketidakadilan struktur, baik struktur politik, sosial, maupun ekonomi yang tidak memungkinkan seseorang atau sekelompok orang menjangkau sumber- sumber kehidupan yang sebenarnya tersedia bagi mereka, karena aset yang ada serta akses terhadap sumber- sumber telah sedemikian rupa dikuasai oleh segolongan orang tertentu.⁴³

Kemiskinan menurut Emil Salim, kemiskinan lazimnya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Dikatakan berada dibawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok, seperti pangan, pakaian, tempat tinggal, dan lain- lain. Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.⁴⁴

Piven dan Cloward (1993) dan Swanson (2001), menunjukkan bahwa kemiskinan berhubungan dengan kekurangan materi, rendahnya penghasilan, dan adanya kebutuhan sosial.

- 1) Kekurangan materi. Kemiskinan menggambarkan adanya kelangkaan materi atau barang- barang yang diperlukan dalam kehidupan sehari- hari, seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kesulitan yang

⁴³ Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 17-18.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 365.

dihadapi orang dalam memperoleh barang- barang yang bersifat kebutuhan dasar.

- 2) Kekurangan penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna “memadai” di sini sering dikaitkan dengan standar atau garis kemiskinan yang berbeda-beda dari satu negara ke negara lainnya. Bahkan dari satu komunitas ke komunitas lainnya dalam satu negara. Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia menetapkan garis kemiskinan berdasarkan “pengeluaran” yang merupakan perkiraan untuk menggambarkan pendapatan seseorang untuk memenuhi sejumlah kebutuhan minimum yang diukur berdasarkan asupan kalori (2.100 kalori) yang diperlukan manusia untuk mampu bertahan hidup (Suharto, 2007). Garis kemiskinan BPS selain berbeda untuk wilayah perdesaan dan perkotaan, juga berbeda untuk setiap provinsi setiap tahunnya.
- 3) Kesulitan memenuhi kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan pelayanan sosial dan rendahnya aksesibilitas lembaga-lembaga pelayanan sosial, seperti lembaga pendidikan, kesehatan, dan informasi.

Dengan demikian, kemiskinan pada hakikatnya menunjuk pada situasi kesengsaraan dan ketidakberdayaan yang dialami seseorang, baik akibat ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan hidup, maupun akibat ketidakmampuan negara atau masyarakat memberikan perlindungan sosial kepada warganya.

Berdasarkan studi SMERU, Suharto menunjukkan sembilan kriteria yang menandai kemiskinan:

- 1) Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan);
- 2) Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental;

- 3) Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil);
- 4) Rendahnya kualitas sumberdaya manusia (buta huruf, rendahnya pendidikan dan keterampilan, sakit- sakitan) dan keterbatasan sumber alam (tanah tidak subur, lokasi terpencil, ketiadaan infrastruktur jalan, listrik, air);
- 5) Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual (rendahnya pendapatan dan aset), maupun massal (rendahnya modal sosial, ketiadaan fasilitas umum);
- 6) Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang memadai dan berkesinambungan;
- 7) Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi);
- 8) Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga atau tidak adanya perlindungan sosial dari negara dan masyarakat);
- 9) Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.

Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) kriteria keluarga yang dikategorikan sebagai keluarga miskin adalah Keluarga Pra- Sejahtera (Pra-KS) dan keluarga Sejahtera I (KS I). Ada lima indikator yang harus dipenuhi agar suatu keluarga dikategorikan sebagai Keluarga Sejahtera I, yaitu:

- 1) Anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut masing- masing.
- 2) Seluruh anggota keluarga pada umumnya makan dua kali sehari atau lebih.
- 3) Seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda di rumah, sekolah, bekerja, dan bepergian.
- 4) Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah.

5) Bila anak sakit atau PUS (Pasangan Usia Subur) ingin mengikuti KB pergi ke sarana/ petugas kesehatan serta diberi cara KB modern.

Sementara itu, keluarga yang dikategorikan keluarga Pra-Sejahtera adalah keluarga- keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari lima indikator tersebut. Pendekatan BKKBN ini masih dianggap kurang realistis karena konsep keluarga Pra Sejahtera dan KS I sifatnya normatif dan lebih sesuai dengan keluarga kecil.⁴⁵

b. Faktor kemiskinan

Kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor. Seseorang atau keluarga miskin bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait satu sama lain, seperti mengalami kecacatan, memiliki pendidikan rendah, tidak memiliki modal atau keterampilan untuk berusaha, tidak tersedianya kesempatan kerja, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), tidak adanya jaminan sosial (pensiun, kesehatan, kematian), atau hidup dilokasi terpencil dengan sumberdaya alam dan infrastruktur yang terbatas.

Secara konseptual, kemiskinan bisa diakibatkan oleh empat faktor, yaitu:

- 1) Faktor individual. Terkait dengan aspek patologis, termasuk kondisi fisik dan psikologis si miskin. Orang miskin disebabkan oleh perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin itu sendiri dalam menghadapi kehidupannya.
- 2) Faktor sosial. Kondisi-kondisi lingkungan sosial yang menjebak seseorang menjadi miskin. Misalnya, diskriminasi berdasarkan usia, jender, etnis yang menyebabkan seseorang menjadi miskin. Termasuk dalam faktor ini adalah kondisi sosial dan ekonomi keluarga si miskin yang biasanya menyebabkan kemiskinan antar generasi.

⁴⁵ Mudrajat Kuncoro, *Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010), hal. 65- 66.

- 3) Faktor kultural. Kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan kemiskinan. Faktor ini secara khusus sering menunjuk pada konsep “kemiskinan kultural” atau “budaya kemiskinan” yang menghubungkan kemiskinan dengan kebiasaan hidup atau mentalitas. Sikap- sikap “negatif” seperti malas, fatalisme atau menyerah pada nasib, tidak memiliki jiwa wirausaha, dan kurang menghormati etos kerja, misalnya, sering ditemukan pada orang-orang miskin.
- 4) Faktor struktural. Menunjuk pada struktur atau sistem yang tidak adil, sehingga menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Sebagai contoh, sistem ekonomi neoliberalisme yang diterapkan di Indonesia telah menyebabkan para petani, nelayan, dan pekerja sektor informal terjerat oleh, dan sulit keluar dari, kemiskinan. Sebaliknya, stimulus ekonomi, pajak dan iklim investasi lebih menguntungkan orang kaya dan pemodal asing untuk terus menumpuk kekayaan.

Dengan menggunakan perspektif yang lebih luas lagi, David Cox membagi kemiskinan kedalam beberapa dimensi:

- 1) Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Globalisasi melahirkan negara pemenang dan negara kalah. Pemenang umumnya adalah negara- negara maju. Sedangkan negara- negara berkembang seringkali semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi.
- 2) Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan subsisten (kemiskinan akibat rendahnya pembangunan), kemiskinan perdesaan (kemiskinan akibat peminggiran perdesaan dalam proses pembangunan), kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang disebabkan oleh hakikat dan kecepatan pertumbuhan perkotaan).
- 3) Kemiskinan sosial. Kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak- anak, dan kelompok minoritas akibat kondisi sosial yang

tidak menguntungkan mereka, seperti bias jender, diskriminasi atau eksploitasi ekonomi.

- 4) Kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian- kejadian lain atau faktor- faktor eksternal di luar si miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk.⁴⁶

3. Program Bantuan Pangan Non- Tunai (BPNT)

a. Pengertian Bantuan Pangan Non- Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non- Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang pangan/e-warungKUBE yang bekerjasama dengan bank HIMBARA.

Program BPNT bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.⁴⁷

Bantuan sosial pangan non-tunai dilakukan dengan cara mengirimkan uang sebesar Rp 110.000,- per bulan kepada penerima program melalui sebuah kartu. Kartu tersebut dapat dibelanjakan barang-barang sembako seperti beras dan telur di *e-Warung KUBE*. *e-WarungKUBE* singkatan dari Elektronik Warung Gotong Royong

⁴⁶ Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 15- 19.

⁴⁷ Benny Rachman, dkk. *Efektivitas Dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)*, *Effectiveness and Perspective of Rice for the Poor and Non-Cash Food Assistance (BPNT) Programs*, Vol. 16, No. 1, Juni, 2018, hal. 2.

Kelompok Usaha Bersama merupakan warung penjual sembako/bahan pangan yang bekerja sama dengan Bank Himbara.⁴⁸

Manfaat Program BPNT adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- 2) Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial;
- 3) Meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT);
- 4) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.⁴⁹

Bantuan Pangan Non- Tunai (BPNT) dapat dikategorikan sebagai bantuan sosial. Bantuan sosial merupakan salah satu bentuk program jaminan sosial (*social security*) yang berupa tunjangan uang, barang, atau pelayanan kesejahteraan yang umumnya diberikan kepada populasi paling rentan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidupnya. Skema ini umumnya diberikan kepada orang berdasarkan “tes kemiskinan” tanpa memperhatikan kontribusi sebelumnya, seperti membayar pajak atau premi asuransi. Keluarga miskin, penganggur, anak- anak, penyandang cacat, lanjut usia, orang dengan kecacatan fisik dan mental, kaum minoritas, yatimpiatu, orang tua tunggal, pengungsi, korban bencana alam atau konflik sosial adalah beberapa contoh kelompok sasaran bantuan sosial.⁵⁰

Tiga tujuan utamaperindungan sosial adalah untuk:

- 1) Mencegah dan mengurangi resiko yang dialami manusia sehingga terhindar dari kesengsaraan yang parah dan berkepanjangan;

⁴⁸ Mayang Shahira Junaidi, dkk. *The Satisfaction Comparison of Bantuan Pangan Non Tunai Recipients and Rastra Recipients In Cakung District, East Jakarta*, Vol. 15, No. 2, Agustus, 2017, hal. 275.

⁴⁹ Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai, 2017, hlm. 11.

⁵⁰Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 88- 89.

- 2) Meningkatkan kemampuan kelompok-kelompok rentan dalam menghadapi dan keluar dari kemiskinan, kesengsaraan dan ketidakamanan sosial- ekonomi;
- 3) Memungkinkan kelompok- kelompok miskin untuk memiliki standar hidup yang bermartabat sehingga kemiskinan tidak diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya.

Agar efektif dan berkelanjutan, kebijakan perlindungan sosial bagi kelompok miskin perlu mempertimbangkan beberapa prinsip sebagai berikut:

- 1) Skema- skema yang dibangun mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi penerima pelayanan;
 - 2) Terhindar dari penciptaan budaya ketergantungan di antara penerima pelayanan;
 - 3) Mendorong efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan, implementasi dan pengawasan program;
 - 4) Sejalan dengan kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial makro, khususnya yang menyangkut kemampuan anggaran, kebijakan fiskal, dan strategi nasional investasi sosial;
 - 5) Diselenggarakan oleh lembaga yang tepat dan kredibel, serta ditunjang oleh teknologi dan sumberdaya manusia yang memiliki komitmen dan kompetensi tinggi;
 - 6) Perumusan kebijakan dan program sebaiknya dilakukan pada saat situasi sosial dan ekonomi sedang baik (normal); bukan saat krisis, sehingga mampu mencegah dan mengatasi situasi yang memburuk.
- b. Landasan pelaksanaan Bantuan Pangan Non- Tunai adalah sebagai berikut:
- 1) Undang- Undang Nomor 6 Tahun1974 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.⁵¹

⁵¹Edi Suharto, *Kemiskinan Dan Perlindungan Sosial di Indonesia, Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 22- 176.

- 2) Pasal 34 Ayat (2) UUD 1945, “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.⁵²
 - 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota.
 - 4) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai.
 - 5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254 /PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.⁵³
- c. Pengukuran keberhasilan pengelolaan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT):

Kaitannya dengan pengelolaan program BPNT, maka yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah dengan mengukur indikator keberhasilan pelaksanaan program BPNT adalah tepat sasaran penerima manfaat, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi.

- 1) Tepat sasaran penerima manfaat; BPNT hanya diberikan kepada KPMkeluarga penerima manfaat BPNTkarena kurang mampu/miskin kemudian didata dan diberi identitas Kartu Keluarga Sejahtera KKS.
- 2) Tepat jumlah; Jumlah saldo yang merupakan hak penerima manfaat Rp110,000,00 per bulan melalui kartu elektronik tersebut.
- 3) Tepat waktu; Waktu pelaksanaan BPNT kepada keluarga penerima manfaat KPMsesuai dengan Rencana.
- 4) Tepat harga; Harga tebus BPNT sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.

⁵²Mudrajat Kuncoro, *Dasar- Dasar Ekonomika Pembangunan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010), hlm. 268.

⁵³ Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai, 2017, hlm. 4.

- 5) Tepat kualitas; Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras Medium.
- 6) Tepat administrasi; Terpenuhinya persyaratan Administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.

Untuk mencapai efektivitas penyaluran BPNT, maka mekanisme pelaksanaannya perlu diatur dengan baik sebagaimana dikemukakan dalam buku Pedoman Umum “Raskin” (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, Tahun 2012.⁵⁴

d. Indikator Rumah Tangga Sasaran (RTS) Penerima BPNT

Dalam menjalankan program tersebut, perlunya menetapkan beberapakriteria dari masyarakat yang menjadi sasaran program BPNT. Dalam kamus bahasa Indonesia dijelaskan bahwa kriteria sama dengan kriterium, kadar, ukuran dan sebagainya untuk mempertimbangkan atau menentukan sesuatu. Adapun menurut Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat beberapa kriteria dari masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai Rumah Tangga Miskin (RTM), yaitu:

- 1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang.
- 2) Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu/ kayu murahan.
- 3) Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa diplester.
- 4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama- sama dengan rumah tangga lain.
- 5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- 6) Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
- 7) Bahan bakar untuk memasak sehari- hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah.

⁵⁴ Singgih Panggayuh, *Efektivitas Pengelolaan Program Raskin Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik*, dalam Skripsi, Surabaya: Universitas Wijaya Putra, 2014, hlm. 26.

- 8) Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam satu kali dalam seminggu.
- 9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
- 10) Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari.
- 11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik.
- 12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan.
- 13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ hanya SD.
- 14) Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya.

Menurut BPS jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga dapat dikatakan miskin. Dalam penentuan penerimaan BPNT hasil dari verifikasi data dari BPS juga melalui musyawarah Desa/ Kelurahan yang telah disahkan oleh camat.⁵⁵

4. Ekonomi Keluarga

a. Pengertian Ekonomi Keluarga

Sebelum memasuki kepengertian Perekonomian Keluarga, dapat dipahami sebelumnya adalah pengertian Perekonomian atau ekonomi.

Pertama, pengertian ekonomi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala hal yang bersangkutan dengan penghasilan, pembagian dan pemakaian barang-barang dan kekayaan (keuangan).⁵⁶

Secara umum, dapat diartikan bahwa ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu,

⁵⁵Misra Yetti, “Pendistribusian Beras Miskin (RASKIN) di Kelurahan Teluk Merbau Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2011, hlm. 33- 34.

⁵⁶ Sulchan Yasyin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amanah), hlm. 135.

masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi.⁵⁷

Sebagai ahli ekonomi selalu mendefinisikan ilmu ekonomi berdasarkan kepada kenyataan, sebagai contoh. Profesor. P.A Samuelson, salah seorang ahli ekonomi terkemuka di dunia, yang menerima Nobel untuk ilmu ekonomi pada tahun 1970 memberikan definisi ilmu ekonomi sebagai berikut: ilmu ekonomi adalah studi mengenai individu-individu dan masyarakat membuat pilihan, dengan atau tanpa uang, dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang, jasa dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi, sekarang dan dimasa yang akan datang, kepada berbagai individu dan golongan masyarakat.⁵⁸

Jadi ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia baik secara individu maupun kelompok masyarakat (dapat berbentuk badan hukum maupun tidak serta dapat pula berbentuk penguasaan atau pemerintahan) dalam memenuhi kebutuhan hidup baik kebutuhan material maupun spiritual (jasmani dan rohani) dimana kebutuhan tersebut cenderung mengarah menjadi tidak terbatas, sedangkan sumber pemenuhan kebutuhan tersebut sangat terbatas.⁵⁹

Kedua, Pengertian Keluarga, keluarga merupakan suatu kelompok kecil dalam masyarakat, terdiri dari seorang suami, istri dan

⁵⁷ Iskandar Putong, *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro Edisi 2*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 14.

⁵⁸ Sanado Soekirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), cet ke 16, hlm. 9.

⁵⁹ M. Rusli Karim, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya Bekerjasama Dengan P3EL UII, 1993), hlm. 3.

anak-anaknya yang selalu menjaga rasa aman dan ketentraman ketika menghadapi segala rasa baik suka maupun duka dalam kehidupannya.

Adapun fungsi keluarga yang lain adalah berkembang biak mensosialisasikan atau mendidik anak, menolong, melindungi atau merawat orang tua/ jompo. Pendapat lain mengatakan fungsi keluarga meliputi pengaturan seksual, reproduksi, sosialisasi, pemeliharaan dan kontrol sosial.⁶⁰

Kewajiban keluarga sebagai kelompok pertama yang dikenal keluarga hendaknya:

1. Selalu menjaga dan memperhatikan cara pandang individu terhadap kebutuhan-kebutuhan pokoknya, baik itu bersifat organik maupun yang bersifat psikologis.
2. Mempersiapkan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan pendidikan artinya keluargalah yang mempunyai tanggungjawab moral pada pendidikan anggota keluarga.
3. Membina individu kearah cita-cita dan menanamkan kebiasaan yang baik dan benar untuk mencapai cita-cita tersebut.
4. Sebagai modal dalam masyarakat yang menjadi acuan baik untuk ditiru dan menjadi kebanggaan masyarakat setempat.⁶¹

Fungsi keluarga merupakan wahana untuk memelihara kelangsungan hidup bagi setiap anggota, agar mampu melaksanakan peran fungsinya berdasarkan kesetaraan. Keluarga berfungsi sebagai pengatur seksual, reproduksi, sosialisasi, penentuan status, perlindungan, serta ekonomi. Jika salah satu fungsi tidak dijalankan dengan baik, maka keluarga rentan mendapatkan masalah, sehingga keluarga tidak sejahtera. Apabila keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi karena tidak punya pekerjaan dan penghasilan, maka keluarga tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik, seperti

⁶⁰ M. Munandar Solaeman, *Ilmu Sosial Dasar*, Teori Dan Konsep Ilmu Sosial, (Bandung: Eresco, 1995), hlm. 5.

⁶¹Darmansyah M, *Ilmu Sosial Dasar, Usaha Nasional*, (Surabaya: Indonesia 1986), hlm. 79.

tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan sosial.⁶²

Keluarga adalah suatu satuan kekerabatan yang juga merupakan satuan tempat yang ditandai oleh adanya kerja sama ekonomi dan mempunyai fungsi untuk berkehidupan, bersosialisasi atau mendidik anak dan menolong serta melindungi yang lemah khususnya merawat orangtua mereka yang telah lanjut usia. Dalam bentuk yang paling sederhana, keluarga terdiri dari seorang laki-laki dan perempuan ditambah dengan anak-anak mereka yang tinggal dalam satu rumah yang sama. Bentuk keluarga yang demikian dalam antropologi dinamakan sebagai keluarga inti. Keluarga inti dapat berubah menjadi keluarga luas oleh adanya tambahan anggota dari sejumlah orang lain, baik sekerabat maupun yang bukan yang secara bersamaan hidup dalam satu rumah dan menjadi anggota dalam keluarga inti.⁶³

Keluarga adalah orang-orang yang memiliki ikatan sosial biologis melalui pernikahan, kelahiran atau adopsi, tidak hidup bersama, dan menggunakan sumber daya secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Menurut Plato, keluarga adalah unit sosial pertama dari perkembangan masyarakat menuju negara kota. Unit yang dimaksud adalah bagian-bagian yang menyatu satu sama lain dalam suatu kerja sama yang sinergis untuk mengerjakan satu hal.⁶⁴

Pengertian lain tentang keluarga adalah suatu unit kekerabatan yang terdiri atas orang-orang yang menganggap bahwa mereka mempunyai hubungan darah, pernikahan atau adopsi. Keluarga dapat berkembang dengan sendirinya ke arah yang lebih besar. Individu lain

⁶²Artikel yang berjudul Kontribusi Home Industri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Keluarga diakses pada tanggal 15 Desember 2019, pukul 08. 35. WIB di <https://andreaspacka.wordpress.com/2011/04/17/home-industri/>.

⁶³ Ekonomi Keluarga Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, artikel ini diakses pada tanggal 15 Desember 2019, pukul 08. 50 WIB dari <https://www.scribd.com/doc/297694243/Pengertian-Ekonomi-Keluarga>

⁶⁴S. Doriza, *Ekonomi Keluarga*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Ofset, 2015), hlm. 3.

dapat menjadi keluarga melalui jalan pernikahan dengan individu lain di keluarga lain. Melalui pernikahan, akan ada ikatan dari dua keluarga yang menjadikan sistem kekeluargaan lebih besar.⁶⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa ekonomi keluarga adalah suatu kajian tentang upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya melalui aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab atas kebutuhan dan kebahagiaan bagi kehidupannya (sekelompok komunitas dari masyarakatnya).⁶⁶

Ekonomi keluarga didasari dengan konsep ekonomi. Ekonomi sebagai disiplin ilmu yang termasuk ke dalam ilmu sosial mengkaji masalah utama yaitu kelangkaan. Kelangkaan merupakan keadaan yang disebabkan oleh kombinasi yang tidak seimbang antara keinginan tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Ketidakseimbangan tersebut di dalam ekonomi rumah tangga terbantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, juga membantu pilihan yang terbaik bagi rumah tangga.⁶⁷

Ekonomi keluarga akan membentuk suatu status ekonomi di dalam sebuah masyarakat. Status ekonomi ditentukan oleh beberapa faktor yaitu pendidikan, pekerjaan, keadaan sosial, latar belakang budaya, dan pendapatan. Status ekonomi dengan berbagai faktor tersebut di dalam ekonomi keluarga hal-hal tersebut dapat diperhitungkan dengan jelas. Keadaan ekonomi dan pendapatan suatu keluarga dapat mempengaruhi gaya hidup anggota dalam keluarga tersebut.⁶⁸

⁶⁵ M. J. Henslein, *Sosiologi Dengan Pendekatan Membumi Edisi ke-6 jilid 2*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 116.

⁶⁶Ekonomi Keluarga Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, artikel ini diakses pada tanggal 15 Desember 2019, pukul 08. 50 WIB dari

<https://www.scribd.com/doc/297694243/Pengertian-Ekonomi-Keluarga>

⁶⁷ S. Doriza, *Ekonomi Keluarga*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Ofset, 2015), hlm. 6-7.

⁶⁸ M. M. Friedman, *Keperawatan Keluarga Teori Dan Praktik*, Edisi 3, (Jakarta: EGC, 1998), hlm. 45.

Terdapat tiga pokok kajian dalam ekonomi keluarga. Pertama, apa yang harus dihasilkan oleh keluarga. Ekonomi keluarga akan membahas tentang kebutuhan dan keinginan keluarga. Kedua, bagaimana cara yang digunakan keluarga untuk menghasilkannya. Ketiga, untuk siapa barang atau jasa yang dihasilkan.⁶⁹

b. Aspek-Aspek Dalam Ekonomi Keluarga

Dalam bermasyarakat terdapat beberapa lapisan ekonomi yang berbeda yaitu ekonomi mampu, ekonomi sedang dan ekonomi keluarga tidak mampu.

1. Ekonomi Keluarga Mampu

Suatu kenyataan yang tidak bisa di sangkal lagi bahwa ekonomi merupakan faktor yang menentukan perilaku seseorang di dalam bermasyarakat dan juga lingkungannya. Di dalam masyarakat terdapat kelas-kelas ekonomi yang dapat dikatakan ekonomi keluarga mampu di bandingkan dengan ekonomi keluarga yang lainnya. Di dalam kehidupan sehari-hari ekonomi keluarga mampu berbeda dengan ekonomi keluarga di bawahnya. Perbedaan-perbedaan inilah yang menyebabkan perbedaan antara kelas ekonomi keluarga mampu dan ekonomi keluarga lemah. Ekonomi keluarga mampu lebih banyak kemudahan-kemudahan untuk memenuhi kebutuhan hidup akibat dari dukungan perekonomian yang mapan di dalam mencukupi kebutuhannya dan juga di dalam mendidik anak-anaknya di bandingkan dengan status ekonomi yang berada di bawahnya.⁷⁰

Ukuran atau kriteria yang bisa di pakai untuk menggolongkan anggota masyarakat ke dalam suatu lapisan adalah ukuran kekayaan, ukuran kekuasaan, ukuran kehormatan dan ukuran ilmu pengetahuan. Ukuran-ukuran tersebut menentukan sebagai dasar

⁶⁹ S. Doriza, *Ekonomi Keluarga*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Ofset, 2015), hlm. 8-14.

⁷⁰ Jalaludin Rahmad, *Islam Alternatif ceramah-ceramah di kampus*, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 121.

sistem lapisan dalam masyarakat. Pada masyarakat tradisional orang yang membuka tanahlah yang mempunyai kelas paling tinggi, keturunan dan kerabat pembuka tanah di anggap masyarakat desa sebagai kelas tertinggi. Lapisan atasan masyarakat tertentu dalam istilah sehari-hari di namakan elit.⁷¹

2. Ekonomi Keluarga Sedang

Status yang banyak terdapat di lingkungan masyarakat adalah status golongan sedang. Status golongan ini dapat hidup di tengah-tengah masyarakat yang bermacam-macam, didalam golongan ini seseorang tidak berlebihan di dalam membelanjakan hartanya juga tidak kekurangan di dalam mencukupi kebutuhan keluarganya. Status mereka dapat berkomunikasi baik dengan status di atasnya juga dapat berkomunikasi baik dengan status di bawahnya. Tingkatan ini jarang di temui masalah yang menonjol di dalam berkomunikasi dengan status yang lainnya.⁷²

Ukuran status keluarga sedang tidak terlalu menonjol di bandingkan status-status yang ada di atasnya karena status ini terlalu banyak di dalam lingkungan masyarakat. Pada dasarnya status keluarga ini dapat memenuhi kebutuhannya seperti kebanyakan keluarga lainnya, hanya saja yang membedakannya adalah tingkatan fasilitas yang di gunakan berbeda dengan fasilitas ekonomi di atasnya. Tapi mereka di tinjau dari sudut kelayakan mereka masih layak untuk hidup dengan orang-orang pada umumnya.⁷³

⁷¹ Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 263.

⁷² W. A. Gerungan, *Psikologi- Sosial Suatu Ringkasan*, (Jakarta-Bandung: PT Eresco, 1978), hal. 185.

⁷³ Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 263.

3. Ekonomi Keluarga Tidak Mampu

Status keluarga yang ketiga adalah status keluarga ekonomi lemah, status ini dapat dikatakan status keluarga tidak mampu (miskin) biasanya status ini kebanyakan berasal dari pedesaan dan juga daerah pemukiman masyarakat yang tertinggal. Akibat dari kemiskinan sangatlah berdampak pada kehidupan manusia, terutama pada pendidikan dan juga kebutuhan hidupnya. Kemiskinan banyak menyebabkan anak-anak bekerja membantu keluarganya di dalam mencukupi kebutuhannya, padahal mereka masih diwajibkan di dalam mencari pendidikan. Akibat dari kemiskinan banyak anak-anak putus sekolah. Efek dari kemiskinan sangatlah buruk bagi perkembangan masyarakat, keterbelakangan akibat masyarakat tidak dapat memperoleh pendidikan. Kondisi keluarga ekonomi lemah sangatlah tidak menguntungkan bagi kehidupan keluarga. Maka dari itu kemiskinan harus segera di tangani dengan serius, agar masa depan kehidupan keluarga menjadi lebih baik.

Akar kemiskinan di Indonesia tidak hanya di cari dalam budaya malas bekerja. Sementara itu keterbatasan wawasan, kurangnya keterampilan dan kurangnya kesehatan dan etos kerja yang buruk, semuanya merupakan faktor internal. Faktor eksternal yaitu kesehatan buruk, rendahnya gizi masyarakat mengakibatkan rendahnya pendapatan dan terbatasnya sumber daya alam.⁷⁴ Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.⁷⁵

⁷⁴ Abad Badruzaman, *Teologi Kaum Tertindas*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), hlm. 132.

⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 319.

BAB 111
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT)
DALAM PENINGKATAN EKONOMI KELUARGAMISKIN DI
KELURAHAN KETAPANG KECAMATAN KENDAL KABUPATEN
KENDAL

A. Gambaran Umum Kelurahan Ketapang Kendal

1. Letak Geografis dan Batas Administratif

Kelurahan Ketapang terletak pada koordinat geografis antara - 6.938521 LS dan 110.21353 BT dengan luas kawasan 145.97 Ha, merupakan salah satu dari 20 Kelurahan seKecamatan Kota Kendal Kabupaten Kendal. Wilayah Kelurahan Ketapang terdiri dari 8 RW dan 26 RT. Kelurahan Ketapang secara geografis berada di daratan rendah yang berbatasan langsung dengan:⁷⁶

Sebelah Barat	: Kelurahan Kebondalem/Karangsari
Sebelah Selatan	: Kelurahan Candirototo/Trompo
Sebelah Timur	: Kecamatan Brangsong
Sebelah Utara	: Kelurahan Banyutowo

Gambar 3. 1
Peta Wilayah Kelurahan Ketapang

⁷⁶ Dokumentasi data monografi Kelurahan Ketapang tahun 2019.



Sumber: Dokumentasi Kelurahan Ketapang

2. Kondisi Demografi

Penduduk yang bermukim di Kelurahan Ketapang adalah warga asli yang bekerja di sektor pertanian, perdagangan dan jasa. Berdasarkan data Monografi penduduk Kelurahan Ketapang berjumlah 4.019 jiwa. Heterogenitas penduduk menyebabkan kondisi sosial masyarakat yang majemuk dengan dinamisasi yang tinggi, dengan jumlah penduduk tahun 2019 adalah 4.019 jiwa dengan perincian laki-laki 2.017 jiwa dan perempuan 2.002 jiwa dan jumlah KK sebanyak 1.305.⁷⁷

Tabel 3.1 Distribusi penduduk Kelurahan Ketapang

No	Data	Tahun 2019
1	Jumlah Penduduk	4.019
2	Jumlah Kepala Keluarga	1.305
3	Penduduk Perempuan	2.002
4	Penduduk Laki-laki	2.017

Sumber: Data Monografi Kelurahan Ketapang Tahun 2019

⁷⁷ Dokumentasi data monografi Kelurahan Ketapang tahun 2019.

Sementara jumlah penduduk Kelurahan Ketapang berdasarkan kelompok usia dapat dilihat ditabel berikut ini.⁷⁸

Tabel 3.2
Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kelurahan Ketapang

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 4	315	237	552
2	5 – 9	173	183	356
3	10 – 14	176	157	333
4	15 – 19	190	199	389
5	20 – 24	227	230	457
6	25 – 29	225	250	475
7	30 – 39	220	225	445
8	40 – 49	226	230	456
9	50 – 59	141	148	289
10	60 +	124	143	267
	JUMLAH	2.017	2.002	4.019

Sumber: Data Monografi Kelurahan Ketapang Tahun 2019

Penduduk berdasarkan jenis pekerjaan jumlah terbanyak yaitu bekerja sebagai buruh tani berjumlah 951 jiwa, petani sendiri berjumlah 392 jiwa, sebagai nelayan berjumlah 54 jiwa, buruh industri berjumlah 430 jiwa, buruh bangunan berjumlah 274 jiwa, pedagang berjumlah 171 jiwa, bekerja sebagai pengangkutan berjumlah 10 jiwa, pegawai negeri berjumlah 76 jiwa, pensiun berjumlah 70 jiwa, sedangkan jenis pekerjaan terendah yaitu pengusaha berjumlah 3 jiwa. Data ini terlihat dalam tabel berikut ini.⁷⁹

⁷⁸ Dokumentasi data monografi Kelurahan Ketapang tahun 2019.

⁷⁹ Dokumentasi data monografi Kelurahan Ketapang tahun 2019.

Tabel 3.3
Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan di Kelurahan Ketapang

No	Kelompok Umur	Jumlah
1	Petani sendiri	392
2	Buruh tani	951
3	Nelayan	54
4	Pengusaha	3
5	Buruh industri	430
6	Buruh bangunan	274
7	Pedagang	171
8	Pengangkutan	10
9	Pegawai Negeri (Sipil/ ABRI)	76
10	Pensiun	70
11	Lain-lain	-
	JUMLAH	2.431

Sumber: Data Monografi Kelurahan Ketapang Tahun 2019

Penduduk berdasarkan pendidikan akhir jumlah terendah yaitu Tamat Akademi/Perguruan Tinggi sejumlah 78 jiwa, tamat SD berjumlah 678 jiwa, tidak tamat SD berjumlah 1.218, belum tamat SD berjumlah 354 jiwa, tidak sekolah berjumlah 427, dan jumlah terbanyak tamat SLTA berjumlah 1.264 jiwa.⁸⁰

Tabel 3.4
Penduduk Berdasarkan Pendidikan Akhir di Kelurahan Ketapang

No	Kelompok Umur	Jumlah
1	Tamat Akademi/Perguruan Tinggi	78
2	Tamat SLTA	1.264

⁸⁰ Dokumentasi data monografi Kelurahan Ketapang tahun 2019.

3	Tamat SD	678
4	Tidak tamat SD	1.218
5	Belum tamat SD	354
6	Tidak sekolah	427
	JUMLAH	4.019

Sumber: Data Monografi Kelurahan Ketapang Tahun 2019

3. Kondisi Ekonomi Sosial Budaya

a. Kondisi Sosial

1) Kelembagaan

Lembaga kemasyarakatan yang ada di Kelurahan Ketapang dari tingkat basis RT sampai tingkat Kelurahan masih eksis dan berjalan sesuai tupoksinya masing-masing dengan keterlibatan masyarakat yang aktif dalam setiap program kegiatannya. Kelembagaan yang ada yaitu RT/RW, LKMD, BKM, PKK dan Karang Taruna.

Dalam setiap organisasi masyarakat ada keterwakilan dari unsur perempuan. Bahkan tidak sedikit organisasi masyarakat secara khusus yang menangani permasalahan perempuan dan kesehatan ibu hamil (PKK, Posyandu dan Dasawisma).

Prasarana penunjang kegiatan kelembagaan yaitu Pemerintah Kelurahan Ketapang menyediakan ruangan untuk tiap lembaga yang ada dan yang aktif kegiatannya di kompleks Kantor Kelurahan Ketapang, yaitu ruang BKM, LKMD dan bahkan ruang PKD.⁸¹

2) Pelayanan Umum, Kesehatan, Pendidikan

Sarana pelayanan umum yang antara lain Kantor Kelurahan Ketapang yang buka setiap jam kerja dan Kantor BKM serta Kantor PKK yang buka pada waktu/jam tertentu. Tujuannya memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

⁸¹ Pemetaan swadaya Kelurahan Ketapang tahun 2019.

Sarana di bidang kesehatan (Bidan Desa dan peralatan kesehatan dan peralatan ibu melahirkan) masih kurang dan prasarananya (ruang PKD) kurang memadai. Fasilitas kesehatan yang ada yang dibutuhkan masyarakat setempat yaitu dibukanya Posyandu dan Pelayanan Kesehatan Desa (PKD). Untuk fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat Ketapang kebanyakan memeriksakan kesehatannya di Puskesmas yang letaknya masih dalam satu kecamatan Kota Kendal. Setiap bulannya dibuka pelayanan pemeriksaan Lansia oleh kader-kader Posyandu Lansia dan Bidan Desa dan Posyandu balita di tiap-tiap RW.

Fasilitas pendidikan di Kelurahan Ketapang tersebar di beberapa wilayah, baik pendidikan formal maupun non formal. Rincian sebarannya pada tabel dibawah ini.⁸²

Tabel 3.5
Sebaran Fasilitas Pendidikan di Kelurahan Ketapang

No	Fasilitas Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	3
2	TK	2
3	SD	2
4	SLTP	-
5	SLTA	-
6	Perguruan Tinggi	-
7	Madrasah	2

Sumber: Pemetaan Swadaya Tahun 2019

Wilayah Kelurahan Ketapang mempunyai sarana peribadatan, kesehatan dan rekreasi yang cukup lengkap.⁸³

⁸² Pemetaan swadaya Kelurahan Ketapang tahun 2019.

⁸³ Data monografi dan demografi Kelurahan Ketapang tahun 2019.

Tabel 3.6
Sarana Peribadatan, Kesehatan, Rekreasi dan Olah Raga
di Kelurahan Ketapang

Sarana Peribadatan, Kesehatan, RTH dan Ruang Publik	Jumlah
Masjid/ mushola	5 unit
Gereja	1 unit
PKD	1 unit
Lapangan Badminton	1 unit
Taman Kota	1 unit

Sumber: Data Monografi dan Demografi Kelurahan Ketapang

Penduduk Kelurahan Ketapang mempunyai kegiatan rutin berupa kelompok-kelompok masyarakat dalam kegiatan keagamaan maupun gotong-royong.⁸⁴

Tabel 3.7 Kegiatan Kelembagaan Sosial Budaya di Kelurahan
Ketapang

Kegiatan	Jumlah
LKMD	1 (Kelurahan)
Pertemuan PKK	26 RT
Pertemuan RT/RW	26 RT
Jamaah Yassin Tahlil	26 RT
Gotong-royong	26 RT
Senam Lansia	1 (Kelurahan)

Sumber: Data Monografi dan Demografi Kelurahan Ketapang

⁸⁴ Data monografi dan demografi Kelurahan Ketapang tahun 2019.

b. Kondisi Ekonomi Masyarakat

Kondisi ekonomi masyarakat yang majemuk menyebabkan dinamisasi dilihat dari mata pencaharian penduduk. Dominasi di sektor perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan dll) merupakan salah satu ciri dari pencaharian masyarakat perkotaan. Namun walaupun masyarakat dengan mata pencaharian yang beragam mereka dapat aktif dalam mengikuti kegiatan yang ada di masing-masing wilayah, minimal tingkat RT (rukun tetangga). Sehingga disini sering terjadi transformasi pengetahuan antar warga masyarakat.

Masyarakat Ketapang mempunyai bentuk aktifitas yang sangat beragam. Letak wilayah yang berdekatan dengan Kota Kecamatan dan berdekatan dengan wilayah pesisir sangat menunjang ekonomi masyarakat. Terutama masyarakat bermatapencaharian sebagai petani, pedagang dan jasa (guru, tenaga kesehatan, buruh pabrik). Kelurahan Ketapang terdapat jalan pantura yang mana banyak angkutan masal yang lalu lalang sehingga dipinggiran jalan ada beberapa warung makan dan pertokoan sandang. Di samping itu beberapa masyarakatnya mempunyai usaha pengasapan ikan. Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai buruh tani.⁸⁵

Tabel 3.8

Sebaran Sarana Perekonomian di Kelurahan Ketapang

No	Sarana Perekonomian	Jumlah
1	Gedung Pertokoan	6 unit
2	Kios Kecil	12 unit
3	Warung Makan	5 unit
4	Penginapan/Hotel	1 unit
5	Koperasi/Bank Simpan Pinjam	2 unit
6	Bengkel	3 unit
7	Bank	2 unit

⁸⁵ Pemetaan swadaya Kelurahan Ketapang tahun 2019.

Sumber: Pemetaan Swadaya Tahun 2019

c. Kondisi Budaya Masyarakat

Budaya masyarakat Ketapang yang masih melekat adalah gotong-royong. Setiap kegiatan di lingkup kawasan pemukiman RT, masyarakat dengan sukarela dan kepeduliannya bergotong-royong membangun rumah maupun kegiatan membangun fasilitas umum seperti jalan dan jembatan.⁸⁶

d. Kondisi Fisik Dasar

Kelurahan Ketapang secara administratif merupakan wilayah perkotaan, namun sebagian wilayahnya merupakan sawah kebun, dengan luas wilayah 145,97 Ha, terdiri dari 8 RW dan 26 RT. Jumlah Kepala Keluarga 1.305.

Wilayah permukiman kumuh terluas di Kelurahan Ketapang menyebar di seluruh RT dan RW. Wilayah tersebut dikatakan permukiman kumuh karena masih banyak jalan yang belum diperkeras, saluran drainase belum ada dan walaupun ada debit air kecil, masih sangat banyak yang BAB di sungai, masih ada rumah yang tidak layak huni terutama, sistem pengelolaan sampah yang belum ada.⁸⁷

e. Kondisi Fungsi Penggunaan Lahan

Secara ekologis wilayah Kelurahan Ketapang merupakan wilayah permukiman, ada sawah, ladang, maupun tegalan. Sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RTRW) Kecamatan Kota Kendal bahwa peruntukan lahan di wilayah Kelurahan Ketapang yaitu kawasan perkantoran swasta dan pemerintah, pasar tradisional, peribadatan, olah raga, pendidikan, kesehatan dan makam.⁸⁸

⁸⁶ Pemetaan swadaya Kelurahan Ketapang tahun 2019.

⁸⁷ Pemetaan swadaya Kelurahan Ketapang tahun 2019.

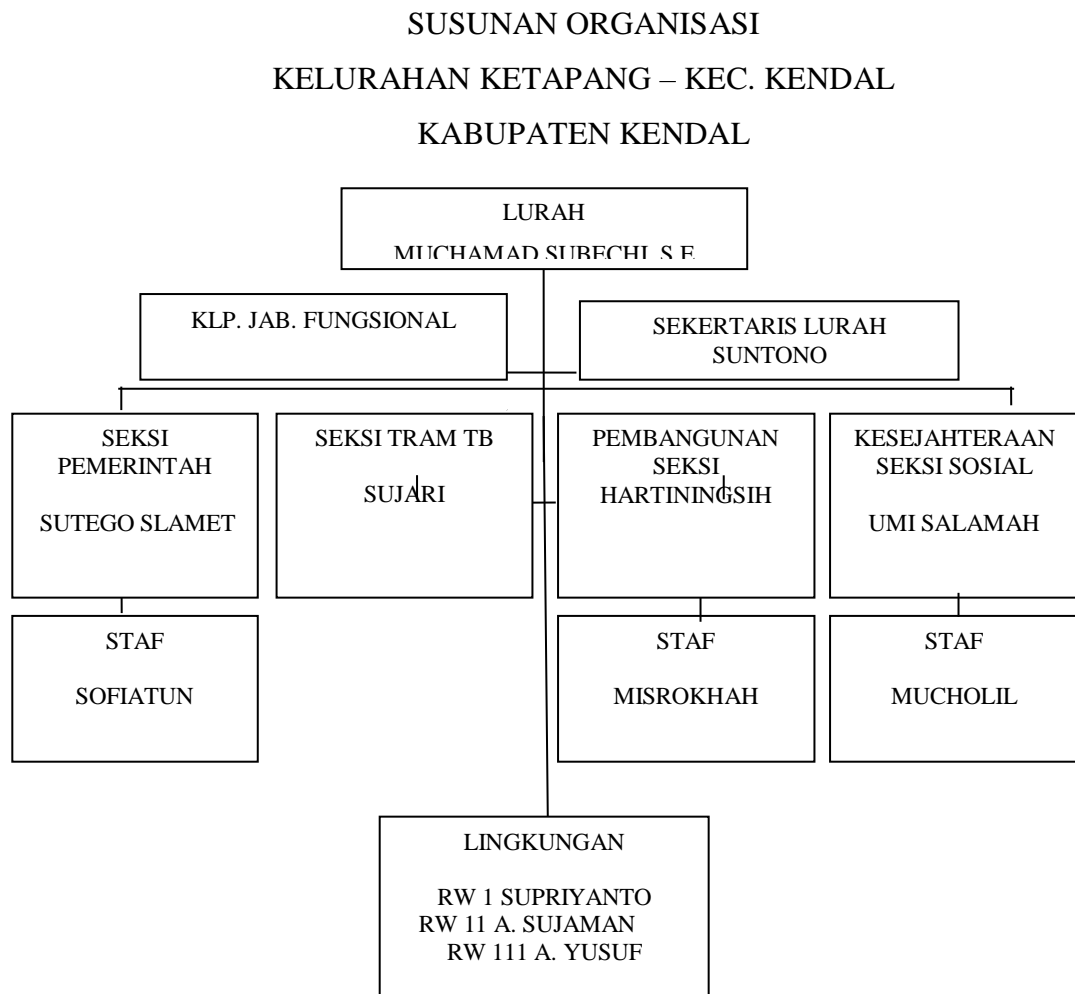
⁸⁸ Pemetaan swadaya Kelurahan Ketapang tahun 2019.

4. Struktur Organisasi Kelurahan Ketapang

Setiap instansi memiliki struktur organisasi yang khas, sesuai dengan tujuan dan kebutuhan instansi tersebut. Dari struktur organisasi terlihat tugas dan fungsi masing-masing bagan dalam suatu instansi. Struktur organisasi menentukan bagaimana efisiensi instansi dalam beroperasi. Struktur organisasi yang baik harus dijalankan dengan konsekuen untuk menjadi dasar yang kuat sehingga tujuan dan sasaran tepat. Berikut merupakan struktur organisasi Kelurahan Ketapang.⁸⁹

Tabel 3.9

Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Ketapang



⁸⁹ Dokumentasi data monografi Kelurahan Ketapang tahun 2019.

Sumber: Dokumentasi Kelurahan Ketapang

B. Profil Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Kelurahan Ketapang

1. Sejarah Berdirinya Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.

Pelaksanaan program bantuan pangan non-tunai (BPNT) di Kelurahan Ketapang mulai dilaksanakan pada bulan Juli 2018.⁹⁰ Pemilihan sebagai salah satu pelaksanaan program BPNT tidak serta merta ditentukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial RI akan melalui mekanisme pemilihan yang sudah ditetapkan. Kriteria pemilihan pelaksanaan program BPNT adalah: tingginya angka kemiskinan dan angka gizi buruk. Selain berdasarkan kriteria data tersebut yang tidak kalah penting adalah adanya komitmen daerah untuk melaksanakan program BPNT. Komitmen daerah tersebut dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan pelayanan yang merupakan kunci keberhasilan program BPNT.⁹¹

KelurahanKetapangKecamatan Kendal Kabupaten Kendal merupakan salah satu Kelurahan yang mempunyai jumlah keluarga miskin yang cukup banyak. Terdapat 118 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebar di 8 RW yang nantinya mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai. Bantuan Pangan Non Tunai diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah terdata, nama-nama yang terdata dapat mendapatkan kartu ATM berwarna merah dengan syarat mengikuti sosialisasi di balai desa, mengumpulkan fotocopy KK dan fotocopy KTP, setelah itu kartu dapat diambil di Kecamatan Kendal.

⁹⁰ Wawancara dengan Ibu Rukatun, selaku pendamping program BPNT Kelurahan Ketapang, pada tanggal 19/1/2019, pukul 10.00 WIB.

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Muchamad Subechi, selaku lurah Ketapang, pada tanggal 22/7/2019, pukul 08.00 WIB.

Keluarga penerima manfaat (KPM) dapat menerima uang sebesar Rp 110.000,- per bulan melalui sebuah kartu yang diterima. Kartu tersebut dapat dibelanjakan barang-barang sembako beras dan telur di *e-Warung KUBE*. *e-Warung KUBE* singkatan dari Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama merupakan warung penjual sembako/bahan pangan yang bekerjasama dengan Bank BTN.⁹² Dengan adanya program Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Ketapang diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan membantu mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.⁹³

2. Visi dan misi Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.

2.1 Visi

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial pada hakekatnya adalah upaya peningkatan kualitas kesejahteraan sosial perorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat yang mempunyai harkat dan martabat sehingga mampu mengambil peran dan menjalankan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan mengacu pada standar pelayanan minimal bidang sosial Kabupaten Kendal dan Kelurahan Ketapang, pembangunan kesejahteraan sosial orientasi.

- a. Membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan pemberdayaan masyarakat terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan mencegah timbulnya gizi buruk pada masyarakat yang kurang mampu.

⁹²Wawancara dengan Ibu Rukatun, selaku pendamping program BPNT Kelurahan Ketapang, pada tanggal 19/1/2019, pukul 10.00 WIB.

⁹³ Wawancara dengan Ibu Munarsih, penerima program BPNT Kelurahan Ketapang, pada tanggal 19/1/2019, pukul 09.10 WIB.

- b. Meningkatkan kepedulian terhadap keluarga kurang mampu sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kelurahan Ketapang.
- c. Meningkatkan kedudukan dan peran masyarakat dalam pembangunan melalui kebijakan daerah yang diimbangi oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan.

2.2 Misi

- a. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
- b. Meningkatkan ketahanan pangan ditingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial.
- c. Menumbuhkan kembangkan harga diri/ percaya diri masyarakat khususnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- d. Mengoptimalkan peran dinas sosial, bulog serta masyarakat.
- e. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro kecil di bidang perdagangan.
- f. Mengurangi angka kemiskinan pada masyarakat kurang mampu dan meningkatkan gizi seimbang.⁹⁴

3. Tujuan Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.

- a. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.
- b. Memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM.
- c. Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan BPNT bagi KPM.
- d. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Muchamad Subechi, selaku lurah Ketapang, pada tanggal 22/7/2019, pukul 08.00 WIB.

- e. Mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.⁹⁵
- f. Mensejahterakan dan memutus rantai kemiskinan masyarakat Kelurahan Ketapang khususnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menjadi anggota program BPNT, sehingga menjadi keluarga yang sejahtera.⁹⁶

4. Manfaat Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.

- a. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- b. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial.
- c. Meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).
- d. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.⁹⁷

5. Prinsip Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.

- a. Mudah dijangkau dan digunakan oleh KPM.
- b. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM tentang kapan, berapa, dan kualitas bahan pangan dengan preferensi.
- c. Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM.
- d. Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada KPM.
- e. *E-warong* dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber sehingga terdapat ruang alternatif pasokan yang lebih optimal.

⁹⁵ Benny Rachman, dkk. *Efektivitas Dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)*, *Effectiveness and Perspective of Rice for the Poor and Non-Cash Food Assistance (BPNT) Programs*, Vol. 16, No. 1, Juni, 2018, hal. 2.

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Muchamad Subechi, selaku lurah Ketapang, pada tanggal 22/7/2019, pukul 08.00 WIB.

⁹⁷ Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai tahun 2017.

- f. Bank penyalur bertugas menyalurkan dana bantuan ke rekening KPM dan tidak bertugas menyalurkan bahan pangan kepada KPM, termasuk tidak melakukan pemesanan bahan pangan.⁹⁸

6. Kriteria e-warung untuk pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.

- a. Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas di wilayah operasionalnya yang dibuktikan dengan lulus proses uji tuntas sesuai dengan kebijakan dan prosedur Bank Penyalur.
- b. Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap dan/atau kegiatan tetap lainnya.
- c. Memiliki jaringan informasi dan kerjasama antar agen/toko dengan pemasok/distributor bahan pangan yang tersedia di pasar untuk memastikan ketersediaan stok bahan pangan bagi pembelian oleh KPM.
- d. Menjual beras dan telur sesuai harga pasar.
- e. Dapat melayani KPM dengan menggunakan infrastruktur perbankan.
- f. Memiliki komitmen yang tinggi dalam pelayanan khusus bagi KPM Lansia (Lanjut Usia) dan KPM Disabilitas.⁹⁹

7. Peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Tabel 3.10

PROVINSI	KAB/KOTA- DESA/KELURAHAN
a. Membentuk Tikor Bansos Pangan. b. Koordinasi ke Tikor Bansos	a. Membentuk Tikor Bansos Pangan. b. Koordinasi ke Kecamatan dan

⁹⁸ Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai tahun 2017.

⁹⁹Pedoman umum bantuan sosial BPNT tahun 2018.

<p>Pangan Kab/Kota tahap pelaksanaan Program BPNT di Kab/Kota.</p> <p>c. Dukungan pendanaan APBD.</p> <p>d. Sosialisasi.</p> <p>e. Penanganan pengaduan.</p> <p>f. Pemantauan.</p> <p>g. Dukungan lain yang diperlukan terkait BPNT.</p>	<p>Kel/Desa untuk pelaksanaan BPNT.</p> <p>c. Dukungan pendanaan APBD.</p> <p>d. Pengecekan keberadaan KPM.</p> <p>e. Edukasi dan sosialisasi.</p> <p>f. Registrasi.</p> <p>g. Pemantauan.</p> <p>h. Penanganan pengaduan.</p> <p>Koordinasi dengan Bank Penyulur:</p> <p>a. Jadwal pendaftaran peserta di masing-masing desa/kelurahan.</p> <p>b. Memastikan keterlibatan perangkat desa/kelurahan dalam proses tersebut.</p>
--	--

Sumber: Pedoman umum BPNT tahun 2017

8. Tahap Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.

A. Tujuan dilaksanakannya sosialisasi dan edukasi dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) adalah:

1. memberikan pemahaman kepada pemangku kepentingan baik pusat dan daerah mengenai kebijakan dan Program Bantuan Pangan Non-Tunai
2. memberikan pemahaman kepada KPM tentang tujuan dan mekanisme pemanfaatan Program Bantuan Pangan Non-Tunai.
3. Memberikan informasi tentang mekanisme pengaduan dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non-Tunai.¹⁰⁰

B. Sasaran kegiatan sosialisasi dan edukasi adalah:

1. Kementrian/Lembaga terkait.
2. Pemerintah Daerah, termasuk Tikor Rastra Daerah dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kota.
3. Kecamatan.
4. Kelurahan.
5. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

¹⁰⁰Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai tahun 2017.

6. Ketua atau pengurus RT/RW.
7. Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
8. E-warong (warung, toko, koperasi, e-warong KUBE, dll).
9. Masyarakat umum.¹⁰¹

9. Implementasi Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.

Bantuan Pangan Non- Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non-tunai dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang pangan/e-warongKUBEyang bekerjasama dengan bank HIMBARA.Program BPNT bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.¹⁰²

Sasaran BPNT adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di kabupaten/kota pelaksanaan BPNT. Dan namanya termasuk di dalam Daftar KPM BPNT yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Daftar KPM BPNT bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Pemerintah Daerah.¹⁰³

KelurahanKetapangKecamatan Kendal Kabupaten Kendal merupakan salah satu Kelurahan yang mempunyai jumlah keluarga miskin

¹⁰¹ Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai tahun 2017.

¹⁰² Benny Rachman, dkk. *Efektivitas Dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)*, *Effectiveness and Perspective of Rice for the Poor and Non-Cash Food Assistance (BPNT) Programs*, Vol. 16, No. 1, Juni, 2018, hal. 2.

¹⁰³ Rangkuman informasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2019.

yang cukup banyak. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Ketapang dalam pendataan masih terbilang sangat kurang karena masih banyak keluarga miskin yang belum terdata sebagai penerima program BPNT. Berikut adalah daftar penduduk miskin Kelurahan Ketapang:

Tabel 3. 11
Data Penduduk Miskin Kelurahan Ketapang

No	Jumlah Keluarga Miskin	RT/ RW
1	16	RT 1/ RW 1
2	8	RT 7/ RW 2
3	7	RT 20/ RW 7
4	6	RT 8/ RW 7
5	9	RT 5/ RW 2
6	6	RT 24/ RW 8
7	5	RT 8/ RW 3
8	7	RT 2/ RW 1
9	6	RT 16/ RW 5
10	9	RT 12/ RW 4
11	7	RT 17/ RW 6
12	10	RT 22/ RW 7
13	8	RT 15/ RW 5
14	10	RT 25/ RW 8
15	7	RT 19/ RW 7
16	9	RT 11/ RW 4
17	11	RT 4/ RW 2
18	20	RT 3/ RW 1
19	10	RT 6/ RW 2
20	7	RT 26/ RW 8
21	13	RT 13/ RW 4
22	12	RT 18/ RW 6
23	8	RT 21/ RW 7

24	8	RT 14/ RW 5
25	7	RT 9/ RW 3
26	5	RT 10/ RW 3

Sumber: Dokumentasi Kelurahan Ketapang

Terdapat 118 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebar di 8 RW yang nantinya mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai. Berikut adalah daftar nama Peserta KPM Kelurahan Ketapang:¹⁰⁴

Tabel 3. 12

Daftar Keluarga Penerima Manfaat Kelurahan Ketapang

NO	NAMA KPM	RT/ RW	KELURAHAN
1	Abibah	RT 1/ RW 1	Ketapang
2	Amanah	RT 7/ RW 2	Ketapang
3	Aminah	RT 20/ RW 7	Ketapang
4	Amronah	RT 8/ RW 7	Ketapang
5	Aspiyah	RT 5/ RW 2	Ketapang
6	Anik Kusnawati	RT 24/ RW 8	Ketapang
7	Asih Puji Rahayu	RT 1/ RW 1	Ketapang
8	Enisah	RT 8/ RW 3	Ketapang
9	Harti	RT 2/ RW 1	Ketapang
10	Herneti	RT 2/ RW 1	Ketapang
11	Irpah	RT 8/ RW 3	Ketapang
12	Imronah	RT 20/ RW 7	Ketapang

¹⁰⁴ Wawancara dengan Ibu Rukatun, selaku pendamping program BPNT Kelurahan Ketapang, pada tanggal 19/1/2019, pukul 10.00 WIB.

13	Istiqomah	RT 16/ RW 5	Ketapang
14	Ilwa Aulia	RT 24/ RW 8	Ketapang
15	Jamsiyah	RT 1/ RW 1	Ketapang
16	Jambari	RT 12/ RW 4	Ketapang
17	Jalmah	RT 17/ RW 6	Ketapang
18	Jumiyati	RT 22/ RW 7	Ketapang
19	Jamilatun	RT 15/ RW 5	Ketapang
20	Juriyah	RT 25/ RW 8	Ketapang
21	Kemi	RT 19/ RW 7	Ketapang
22	Komsatun	RT 11/ RW 4	Ketapang
23	Komsatun	RT 7/ RW 2	Ketapang
24	Karsiyah	RT 4/ RW 2	Ketapang
25	Kamiyati	RT 1/ RW 1	Ketapang
26	Kasmonah	RT 16/ RW 5	Ketapang
27	Karsiyah	RT 3/ RW 1	Ketapang
28	Kaptinah	RT 12/ RW 4	Ketapang
29	Kasni	RT 2/ RW 1	Ketapang
30	Koidah	RT 17/ RW 6	Ketapang
31	Kosidah	RT 1/ RW 1	Ketapang
32	Lestari	RT 20/ RW 7	Ketapang
33	Lestari	RT 4/ RW 2	Ketapang
34	Lilin Bidiyanti	RT 5/ RW 2	Ketapang

35	Maskur	RT 7/ RW 2	Ketapang
36	Masamah	RT 16/ RW 5	Ketapang
37	Marsinah	RT 5/ RW 2	Ketapang
38	Mariyatun	RT 3/ RW 1	Ketapang
39	Maskanah	RT 20/ RW 7	Ketapang
40	Mudrikah	RT 12/ RW 4	Ketapang
41	Mudrikah	RT 6/ RW 2	Ketapang
42	Munarsih	RT 1/ RW 1	Ketapang
43	Murniati	RT 26/ RW 8	Ketapang
44	Muthoif	RT 13/ RW 4	Ketapang
45	Nur Khasanah	RT 15/ RW 5	Ketapang
46	Nur Diani	RT 26/ RW 8	Ketapang
47	Ngaminah	RT 26/ RW 8	Ketapang
48	Ngatmi	RT 13/ RW 4	Ketapang
49	Ngasmi	RT 4/ RW 2	Ketapang
50	Ngarjan	RT 1/ RW 1	Ketapang
51	Ngapiyah	RT 18/ RW 6	Ketapang
52	Patim	RT 1/ RW 1	Ketapang
53	Rukatun	RT 1/ RW 1	Ketapang
54	Ruminah	RT 11/ RW 4	Ketapang
55	Rohmi	RT 1/ RW 1	Ketapang
56	Rohmatun	RT 2/ RW 1	Ketapang

57	Romdonah	RT 21/ RW 7	Ketapang
58	Rokhayati	RT 3/ RW 1	Ketapang
59	Rapinah	RT 22/ RW 7	Ketapang
60	Rumini	RT 15/ RW 5	Ketapang
61	Rofiah	RT 15/ RW 5	Ketapang
62	Riati	RT 18/ RW 6	Ketapang
63	Rosanah	RT 18/ RW 6	Ketapang
64	Siti Munastri	RT 3/ RW 1	Ketapang
65	Siti Khotimah	RT 12/ RW 4	Ketapang
66	Siti Qomah	RT 5/ RW 2	Ketapang
67	Siti Amirah	RT 5/ RW 2	Ketapang
68	Siti Asomah	RT 14/ RW 5	Ketapang
69	Siti Baiyah	RT 20/ RW 7	Ketapang
70	Siti Patonah	RT 7/ RW 2	Ketapang
71	Siti Sarkati	RT 20/ RW 7	Ketapang
72	Siti Aminah	RT 24/ RW 8	Ketapang
73	Siti Khotijah	RT 18/ RW 6	Ketapang
74	Siti Khotijah	RT 22/ RW 7	Ketapang
75	Siti Amah	RT 17/ RW 6	Ketapang
76	Siti Mariah	RT 2/ RW 1	Ketapang
77	Siti Nur Azizah	RT 24/ RW 8	Ketapang
78	Sri Kuswati	RT 8/ RW 3	Ketapang

79	Sri Mulyati	RT 7/ RW 2	Ketapang
80	Sri Kayatun	RT 9/ RW 3	Ketapang
81	Sriyanah	RT 19/ RW 7	Ketapang
82	Sutriyah	RT 16/ RW 5	Ketapang
83	Sarmini	RT 17/ RW 6	Ketapang
84	Sutinah	RT 15/ RW 5	Ketapang
85	Sulton	RT 5/ RW 2	Ketapang
86	Sutariyah	RT 13/ RW 4	Ketapang
87	Sumanah	RT 12/ RW 4	Ketapang
88	Sutini	RT 4/ RW 2	Ketapang
89	Sutarjo	RT 1/ RW 1	Ketapang
90	Sutarmi	RT 21/ RW 7	Ketapang
91	Sutiah	RT 20/ RW 7	Ketapang
92	Sulastri	RT 14/ RW 5	Ketapang
93	Surapti	RT 21/ RW 7	Ketapang
94	Suratmi	RT 21/ RW 7	Ketapang
95	Surip	RT 19/ RW 7	Ketapang
96	Saminem	RT 1/ RW 1	Ketapamh
97	Salbiyah	RT 4/ RW 2	Ketapang
98	Sariyati	RT 26/ RW 8	Ketapang
99	Setiyo	RT 9/ RW 3	Ketapang
100	Sopiatun	RT 15/ RW 5	Ketapang

101	Tuminah	RT 14/ RW 5	Ketapang
102	Tumanah	RT 4/ RW 2	Ketapang
103	Triani Setianingsih	RT 7/ RW 2	Ketapang
104	Wahyuningsih	RT 15/ RW 5	Ketapang
105	Yasri	RT 15/ RW 5	Ketapang
106	Kasmi	RT 2/ RW 1	Ketapang
107	Mudrikah	RT 22/ RW 7	Ketapang
108	Nur Aslihah	RT 10/ RW 3	Ketapang
109	Siti Mariyam	RT 10/ RW 3	Ketapang
110	Musyafaah	RT 1/ RW 1	Ketapang
111	Romdonah	RT 14/ RW 5	Ketapang
112	Kiswati	RT 4/ RW 2	Ketapang
113	Warti	RT 11/ RW 4	Ketapang
114	Maryuni	RT 10/ RW 3	Ketapang
115	Sulami	RT 6/ RW 2	Ketapang
116	Supaatun	RT 2/ RW 1	Ketapang
117	Marwanah	RT 26/ RW 8	Ketapang
118	Retini	RT 5/ RW 2	Ketapang

Sumber: Dokumentasi Kelurahan Ketapang

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Bantuan Pangan Non Tunai yang telah terdata, nama-nama yang terdata dapat mendapatkan kartu ATM berwarna merah dengan syarat mengikuti sosialisasi di balai desa, mengumpulkan fotocopyKK dan fotocopy KTP, setelah itu kartu dapat diambil di Kecamatan Kendal. Kartu yang

digunakan dalam penyaluran BPNT adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yaitu kartu debit atas nama penerima bantuan dari keluarga miskin.

Gambar 3.2



Sumber: Dokumentasi Kelurahan Ketapang

KKS berfungsi sebagai wallet uang elektronik sehingga pada saat pemanfaatan bansos wajib dibawa oleh KPM. Keluarga penerima manfaat (KPM) dapat menerima uang sebesar Rp 110.000,- per bulan melalui sebuah kartu yang diterima. Kartu tersebut dapat dibelanjakan barang-barang sembako beras dan telur di *e-Warung* KUBE. *e-Warung* KUBE singkatan dari Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama merupakan warung penjual sembako/bahan pangan yang bekerja sama dengan Bank BTN.¹⁰⁵

Berdasarkan penelitian di lapangan, pemerintah perlu memprioritaskan pembaruan data penerima program BPNT. Sebab masih ada keluarga miskin yang belum menerima bantuan. Masyarakat yang keadaan ekonominya belum mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarganya tetapi tidak terdata sebagai penerima program BPNT. Dari jumlah penduduk miskin ada 231 keluarga hanya ada 118 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdata mendapatkan BPNT, dan masih

¹⁰⁵ Wawancara dengan Ibu Rukatun, selaku pendamping program BPNT Kelurahan Ketapang, pada tanggal 19/1/2019, pukul 10.00 WIB.

terdapat keluarga miskin yang belum merasakan manfaat adanya program BPNT di Kelurahan Ketapang.¹⁰⁶

10. Hasil Implementasi Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.

Pemerintah sendiri terus melakukan penanggulangan kemiskinan hinggasaat ini. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu membuat program yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan tersebut. Dalam rangka mengentaskan kemiskinan pemerintah telah banyak melaksanakan berbagai program. Program pemerintah tersebut diantaranya Bantuan Pangan Non Tunai. Dilaksanakannya suatu program Bantuan Pangan Non Tunai diharapkan dapat membuahkan hasil yang baik. Kebijakan pemerintah dalam menangani kemiskinan khususnya Kelurahan Ketapang adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dilaksanakan sejak bulan Juli tahun 2018.¹⁰⁷ Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka hasil penelitian terkait dengan Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat dirasakan oleh Keluarga Penerima Manfaat yang diperoleh. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Jamsiyah. Bahwa:

“Kalo menurut saya pendataan penerima Bantuan Pangan Non Tunai kurang sesuai mbak sehingga masih terdapat kecemburuan sosial. Seharusnya Ibu Aisyah saja dapat bantuan itu karna kondisi ekonominya yang menurut saya masih tergolong miskin, tetapi saya dengar katanya akan ada penambahan data penerima bantuan itu tapi kenyataannya sampai sekarang belum terlaksana. Akan tetapi Allhamdulillah dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sangatlah membantu meringankan beban kebutuhan pokok untuk hidup sehari-hari keluarga saya selaku penerima bantuan ini.”¹⁰⁸

¹⁰⁶ Wawancara dengan Ibu Rukatun, selaku pendamping program BPNT Kelurahan Ketapang, pada tanggal 19/1/2019, pukul 10.00 WIB.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Ibu Rukatun, selaku pendamping program BPNT Kelurahan Ketapang, pada tanggal 19/1/2019, pukul 10.00 WIB.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Ibu Jamsiyah, penerima program BPNT Kelurahan Ketapang, pada tanggal 22/7/2019, pukul 10.10 WIB.

Hal serupa juga di sampaikan oleh Ibu Saminem selaku penerima program Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Ketapang bahwa:

“Saya sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menyatakan puas terhadap pelaksanaan program tersebut dibandingkan program sebelumnya yang Rastra itu mbak. Proses BPNT saat ini mudah dan memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM sehingga memberikan manfaat positif bagi saya dan keluarga saya. Akan tetapi dalam pelaksanaan program BPNT di Kelurahan Ketapang masih terdapat ketepatan sasaran yang masih kurang tepat, keluarga yang seharusnya mendapatkan bantuan masih ada yang belum terdata. Tetapi katanya itu akan ada penambahan data mbak, tapi sampai saat ini sepertinya belum ada penambahan lagi.”¹⁰⁹

Adanya program BPNT yang terselenggara diharapkan bisa memberikan hasil yang positif bagi Keluarga Penerima Manfaat. Masyarakat dapat mengembangkan kemampuan berwirausaha, dengan mengenalkan transaksi pelayanan secara elektronik menggunakan Kartu elektronik Keluarga Sejahtera (KKS), yang diberikan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Berikut hasil wawancara yang diungkapkan oleh Ibu Pujiasih, selaku pemilik *E-warong* KUBE penjual sembako program BPNT Kelurahan Ketapang, Ia menjelaskan bahwa:

“ Program BPNT menyediakan sarana pelayanan transaksi keuangan secara elektronik dengan memberdayakan masyarakat sebagai pengelola e-Warong itu sendiri. Nah dengan demikian masyarakat dapat mengembangkan kemampuannya dalam berwirausaha. Program e-Warong ini membantu saya untuk dapat mengembangkan kemampuan dalam berwirausaha. Program ini membantu mengenalkan teknologi kepada kami untuk menjalankannya sebagai operator. Program ini juga memberikan pembelajaran khusus bertransaksi dengan cara non tunai. Awalnya saya kurang mengerti dalam melakukan transaksi dengan elektronik ini mbak. Namun karena tuntutan dari program dan pendamping

¹⁰⁹ Wawancara dengan Ibu Saminem, penerima program BPNT Kelurahan Ketapang, pada tanggal 15/6/2019, pukul 08.30 WIB.

selalumengajarkan melakukan transaksi. Maka perlahan saya sudah terbiasa menggunakannya.”¹¹⁰

Tujuan lain disampaikan oleh Pendamping program BPNT Kelurahan Ketapang yakni:

“Dengan adanya program e-Warong kan dapat mempercepat peningkatan ekonomi penerima program, di mana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diberdayakan untuk kemudian ditunjuk membuat e-Warong dirumahnya, yang nantinya mereka diberdayakan sebagai penyalur bantuan-bantuansosial yang tentunya non tunai.”¹¹¹

Program BPNT memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh penerimanya dari segi ekonomi. Seperti dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dapat mengurangi beban pengeluaran dari masyarakat yang dulunya tidak berkecukupan sekarang sudah merasa semakin meningkat daya beli masyarakatnya. Pernyataan di atas menunjukkan bahwa program BPNT diterapkan agar masyarakat dapat mandiri dalam melakukan transaksi non tunai pada *e-Warong* Program BPNT dan membantu masyarakat dalam segi ekonomi seperti pemenuhan kebutuhan sehari-hari dapat mengurangi beban pengeluaran dari masyarakat yang dulunya tidak berkecukupan sekarang semakin meningkat daya beli masyarakatnya. Meningkatkan efektivitas bantuan sosial dengan cara non tunai dalam pemberian bahan pangan, serta mendorong keuangan inklusif yakni mengikut sertakan masyarakat untuk menjadi wirausaha. Pemerintah membuat program BPNT berarti merangkul masyarakat dalam mengembangkan kemampuan berwirausaha dengan membuka *e-Warong* KUBE BPNT, tidak adanya penyalahgunaan dana bantuan yang diberikan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dengan menggunakan Kartu elektronik Keluarga Sejahtera (KKS) masyarakat tidak dapat menggunakan uangnya selain membeli bahan pangan beras dan telur.

¹¹⁰ Wawancara dengan Ibu Pujasih, pemilik *e-Warong* program BPNT Kelurahan Ketapang, pada tanggal 15/6/2019, pukul 09.15 WIB.

¹¹¹ Wawancara dengan Ibu Rukatun, selaku pendamping program BPNT Kelurahan Ketapang, pada tanggal 19/1/2019, pukul 10.00 WIB.

BAB IV
ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON
TUNAI (BPNT) DALAM PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA
MISKIN DI KELURAHAN KETAPANG KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN KENDAL

A. Analisis Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Miskin Di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal

Ekonomi keluarga adalah suatu kajian tentang upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya melalui aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab atas kebutuhan dan kebahagiaan bagi kehidupannya (sekelompok komunitas dari masyarakatnya).¹¹² Ekonomi keluarga didasari dengan konsep ekonomi. Ekonomi sebagai disiplin ilmu yang termasuk ke dalam ilmu sosial mengkaji masalah utama yaitu kelangkaan. Kelangkaan merupakan keadaan yang disebabkan oleh kombinasi yang tidak seimbang antara keinginan tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Ketidakeimbangan tersebut di dalam ekonomi rumah tangga terbantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, juga membantu pilihan yang terbaik bagi rumah tangga.¹¹³

Salah satu program yang dikembangkan oleh Pemerintah untuk meningkatkan ekonomi keluarga miskin adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun

¹¹² Ekonomi Keluarga Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, artikel ini diakses pada tanggal 15 Desember 2019, pukul 08. 50 WIB dari <https://www.scribd.com/doc/297694243/Pengertian-Ekonomi-Keluarga>

¹¹³S. Doriza, *Ekonomi Keluarga*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Ofset, 2015), hlm. 6-7.

elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang pangan/e-warong KUBE yang bekerjasama dengan bank HIMBARA. Program BPNT bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.¹¹⁴

Beberapa manfaat yang diharapkan adalah meningkatkan ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial, meningkatkan transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).¹¹⁵

Keberhasilan pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai BPNT diukur berdasarkan tingkat pencapaian tepatsasaranpenerima manfaat, tepatjumlah, tepatwaktu, tepat harga, tepat kualitas dan tepat administrasi.

- 7) Tepatsasaranpenerima manfaat; BPNT hanyadiberikan kepada KPMkeluargapenerima manfaat BPNTkarenakurangmampu/miskinkemudiandidatandiberiidentitasKartuKeluarga Sejahtera KKS.
- 8) Tepatjumlah; Jumlahsaldo yang merupakanhakpenerima manfaat Rp110,000,00 per bulanmelaluikartuelektroniktersebut.

¹¹⁴ Benny Rachman, dkk. *Efektivitas Dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Effectiveness and Perspective of Rice for the Poor and Non-Cash Food Assistance (BPNT) Programs*, Vol. 16, No. 1, Juni, 2018, hal. 2.

¹¹⁵ Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai tahun 2017.

- 9) Tepat waktu; Waktu pelaksanaan BPNT kepada keluarga penerima manfaat KPM sesuai dengan Rencana.
- 10) Tepat harga; Harga bus BPNT sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.
- 11) Tepat kualitas; Terpenuhi persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras Medium.
- 12) Tepat administrasi; Terpenuhi persyaratan Administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.¹¹⁶

Pelaksanaan program bantuan pangan non-tunai (BPNT) di Kelurahan Ketapang mulai dilaksanakan pada bulan Juli 2018. Pada setiap kelurahan memiliki satu pendamping Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk terlaksananya Program Bantuan Pangan Non Tunai dengan baik. Pendamping Program Bantuan Pangan Non Tunai Kelurahan Ketapang bernama Ibu Rukatun.¹¹⁷ Pemilihan sebagai salah satu pelaksanaan program BPNT tidak serta merta ditentukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial RI akan melalui mekanisme pemilihan yang sudah ditetapkan. Kriteria pemilihan pelaksanaan program BPNT adalah: tingginya angka kemiskinan dan angka gizi buruk. Selain berdasarkan kriteria data tersebut yang tidak kalah penting adalah adanya komitmen daerah untuk melaksanakan program BPNT. Komitmen daerah tersebut dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan pelayanan yang merupakan kunci keberhasilan program BPNT.¹¹⁸

Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal merupakan salah satu Kelurahan yang mempunyai jumlah keluarga miskin yang cukup banyak. Terdapat 118 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebar di 8 RW yang nantinya mendapatkan Bantuan Pangan Non

¹¹⁶ Singgih Panggayuh, *Efektivitas Pengelolaan Program Raskin Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik*, dalam Skripsi, Surabaya: Universitas Wijaya Putra, 2014, hlm. 26.

¹¹⁷ Wawancara dengan Ibu Rukatun, selaku pendamping program BPNT Kelurahan Ketapang, pada tanggal 19/1/2019, pukul 10.00 WIB.

¹¹⁸ Wawancara dengan Bapak Muchamad Subechi, selaku lurah Ketapang, pada tanggal 22/7/2019, pukul 08.00 WIB.

Tunai.¹¹⁹Keberhasilanpelaksanaansuatu ProgramBantuan Pangan Non Tunai (BPNT)di suatu daerah harus memenuhi berdasarkan tingkat pencapaiantepatsasaranpenerimamanfaat, tepatjumlah, tepatwaktu, tepat harga, tepatkualitasdantepatadministrasi.Berdasarkan data pada lapangan diperoleh data sebagai berikut:

- 1) Tepat sasaran penerima manfaat; BPNT hanya diberikan kepada KPM keluarga penerima manfaat BPNT karena kurang mampu/ miskin kemudian didata dan diberi identitas Kartu Keluarga Sejahtera KKS.

Sasaran Penerima Manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai adalah keluarga yang disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah didaerah pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kementrian Sosial. Daftar KPM BPNT bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Pemerintah Daerah.¹²⁰

Hasil wawancara peneliti dengan salah satu penerima program Bantuan Pangan Non Tunai Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, yakni dengan Ibu Kosidah, Ia menjelaskan bahwa:

“ Pendataan penerima program BPNT ini tidak sembarang mbk, karena benar” disurvey tetapi data penerima yang digunakan itu sepertinya data lama yang dulu program RASTRA itu, dulu kan ada program RASTRA sebelum program BPNT itu, hanya saja bertambah beberapa orang untuk program BPNT. Menurut Saya di Kelurahan Ketapang sendiri masih terdapat kecemburuan sosial karena memang benar adanya keluarga yang terbilang mampu masih mendapatkan bantuan karena masih menggunakan data lama, keluarga miskin yang seharusnya mendapat bantuan BPNT ini tapi kenyataannya tidak dapat, saya dengar” itu akan ada penambahan data penerima bantuan ini tapi kok belum juga bertambah lagi untuk si penerima. Allhamdulillah saya termasuk yang menerima program BPNT ini, karena memang kondisi ekonomi keluarga yang termasuk miskin, saya ini bekerja sebagai buruh tani mbk dan suami saya bekerja sebagai serabutan. Untuk penghasilan per bulan Rp 500.000 saja saya udah Allhamdulillah mbk, jadi dengan

¹¹⁹ Wawancara dengan Ibu Rukatu, selaku pendamping program BPNT Kelurahan Ketapang, pada tanggal 19/1/2019, pukul 10.00 WIB.

¹²⁰ Rangkuman informasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2019.

adanya program ini ya saya mengucapkan terimakasih kepada pihak yang berwenang dalam program BPNT ini."¹²¹

Wawancara yang diungkapkan oleh Ibu Jamsiyah sebagai penerima program BPNT Kelurahan Ketapang. Bahwa:

"Kalo menurut sayapendataan penerima Bantuan Pangan Non Tunai kurang sesuai mbak sehingga masih terdapat kecemburuan sosial. Seharusnya Ibu Aisyah saja dapat bantuan itu karna kondisi ekonominya yang menurut saya masih tergolong miskin, tetapi saya dengar katanya akan ada penambahan data penerima bantuan itu tapi kenyataannya sampai sekarang belum terlaksana. Akan tetapi Allhamdulillah dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sangatlah membantu meringankan beban kebutuhan pokok untuk hidup sehari-hari keluarga saya selaku penerima bantuan ini."¹²²

Hal serupa juga di sampaikan oleh Ibu Saminem selaku penerima program Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Ketapang bahwa:

"Saya sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menyatakan puas terhadap pelaksanaan program tersebut dibandingkan program sebelumnya yang Rastra itu mbak. Proses BPNT saat ini mudah dan memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM sehingga memberikan manfaat positif bagi saya dan keluarga saya. Akan tetapi dalam pelaksanaan program BPNT di Kelurahan Ketapang masih terdapat ketepatan sasaran yang masih kurang tepat, keluarga yang seharusnya mendapatkan bantuan masih ada yang belum terdata. Tetapi katanya itu akan ada penambahan data mbak, tapi sampai saat ini sepertinya belum ada penambahan lagi."¹²³

Hasil wawancara yang diungkapkan oleh Ibu Pujiasih, selaku pemilik *E-warong* KUBE penjual sembako program BPNT Kelurahan Ketapang, Ia menjelaskan bahwa:

" Menurut saya pendataan penerima program BPNT di Kelurahan Ketapang ini kurang sesuai mbk, alasannya karena data yang

¹²¹ Wawancara dengan Ibu Kosidah, penerima program BPNT Kelurahan Ketapang, pada tanggal 15/6/2019, pukul 10.15 WIB.

¹²²Wawancara dengan Ibu Jamsiyah, penerima program BPNT Kelurahan Ketapang, pada tanggal 22/7/2019, pukul 10.10 WIB.

¹²³ Wawancara dengan Ibu Saminem, penerima program BPNT Kelurahan Ketapang, pada tanggal 15/6/2019, pukul 08.30 WIB.

digunakan masih data lama yang dulu masih program RASTRA itu, keluarga yang kondisinya terbelang mampu masih mendapatkan program BPNT. Karena sebagian besar penerima program BPNT di Kelurahan Ketapang ini keluarga yang keadaan ekonominya cukup baik dalam hal ini sebagian besar dari mereka memiliki lahan pertanian. Walaupun para petani tidak dapat merasakan hasil dari apa yang mereka tanam setiap harinya namun mereka masih dapat memenuhi segala kebutuhan di dalam keluarga mereka dengan mengandalkan pendapatan dari hasil panen raya mereka untuk beberapa bulan kedepan. Saya lihat itu masih ada keluarga miskin yang ada di Kelurahan Ketapang yang belum merasakan manfaat adanya program BPNT ini, seperti para rumah tangga pendatang yang status ekonominya dikatakan tidak mampu namun belum terdata oleh pihak kelurahan atas hak mereka menerima program BPNT.”¹²⁴

Hasil wawancara dengan Ibu Rukatun, selaku pendamping program BPNT Kelurahan Ketapang, bahwa:

“ Jumlah penerima program BPNT di Kelurahan Ketapang yang terdata ada 118 orang mbk, memang data yang digunakan data lama yang dulu RASTRA Terus ada ketambahan data lagi beberapa orang. Kalaupun mau ditambah lagi data untuk penerima program BPNT Saya menunggu dari pihak atasan Kecamatan terus ke Kelurahan. Saya ini termasuk yang bertanggung jawab terkait pelaksanaan program BPNT Kelurahan Ketapang karena saya di tunjuk sebagai pendamping program BPNT di sini.”¹²⁵

Berdasarkan uraian di atas mengenai ketepatan sasaran program BPNT di Kelurahan Ketapang dapat disimpulkan bahwa BPNT di Kelurahan Ketapang belum tepat sasaran karena masih ada masyarakat yang keadaan ekonominya belum mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarganya tetapi tidak terdata sebagai penerima program BPNT sehingga masih terdapat kecemburuan sosial.

- 2) Tepatjumlah; Jumlahsaldo yang merupakan hakpenerima manfaat Rp110,000,00 per bulanmelalui kartuelektronik tersebut.

¹²⁴ Wawancara dengan Ibu Pujiasih, pemilik *e-Warong* program BPNT Kelurahan Ketapang, pada tanggal 15/6/2019, pukul 09.15 WIB.

¹²⁵ Wawancara dengan Ibu Rukatun, selaku pendamping program BPNT Kelurahan Ketapang, pada tanggal 19/1/2019, pukul 10.00 WIB.

Besaran jumlah BPNT adalah Rp 110,000,00. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai, dan hanya dapat ditukarkan dengan beras dan/ telur di *E-warong* KUBE melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yaitu kartu debit atas nama penerima bantuan dari keluarga miskin. Pemilihan komoditas beras dan/ telur dalam Program BPNT berdasarkan tujuan untuk menjaga mencukupi gizi KPM. Penambahan jenis komoditas untuk mencapai tujuan tersebut dapat ditentukan berdasarkan hasil evaluasi. Apabila bantuan tidak dibelanjakan dibulan tersebut, maka nilai bantuan tetap tersimpan dan terakumulasi dalam rekening Bantuan Pangan Non Tunai.¹²⁶

Di bawah ini diuraikan pandangan mengenai ketepatan jumlah dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal. Berikut kutipan wawancara dengan Ibu Rukatun:

“Selama saya mendampingi di Kelurahan Ketapang, jumlah bantuan yang disalurkan selama ini sudah sesuai dengan ketentuan dari pemerintah yaitu Rp 110,000,00. Tidak ada penarikan dari pihak manapun juga. Dan penyaluran BPNT langsung disalurkan ke masing-masing rekening penerima BPNT. Hanya saja kalau waktunya penyaluran, pendamping hanya menyampaikan bahwa dana BPNT sudah keluar dan dapat di ambil direkening masing-masing penerima BPNT untuk segera di tukarkan sembako berupa beras 10 Kg dan telur ¼ Kg di E-warong KUBE.”¹²⁷

Begitupun jawaban yang sama dari penerima program BPNT, berikut kutipan wawancara dengan Ibu Munarsih:

“Selama mendapat BPNT, jumlahnya selalu sama mbak. Tidak ada pengurangan. Kalau dana keluar saya langsung ke E-warong KUBE Kelurahan Ketapang untuk menukarkan sembako berupa beras 10 Kg dan telur ¼ Kg.”¹²⁸

¹²⁶ Pedoman umum bantuan sosial BPNT tahun 2018.

¹²⁷ Wawancara dengan Ibu Rukatun, selaku pendamping program BPNT Kelurahan Ketapang, pada tanggal 19/1/2019, pukul 10.00 WIB.

¹²⁸ Wawancara dengan Ibu Munarsih, penerima program BPNT Kelurahan Ketapang, pada tanggal 19/1/2019, pukul 09.10 WIB.

Wawancara dengan Ibu Kosidah mendapatkan jawaban yang sama, berikut kutipan wawancaranya:

“Saya selalu mendapatkan BPNT dengan jumlah yang sama dengan yang lain mbak, di kartu ATM berwarna merah saldo dari pemerintah per bulan Rp 110,000,00 dan nanti saya tukarkan sembako.”¹²⁹

Menurut Ibu Jamsiyah, jumlah bantuan yang diterima selama ini sudah sama dan sesuai dengan ketentuan dari pemerintah, berikut kutipan wawancaranya;

“Saya selalu mendapatkan BPNT sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah mbak. Uangnya kan ditransfer melalui ATM berwarna merah. Kemudian saya belanja sembako di E-warong KUBE berupa beras 10 Kg dan telur ¼ Kg.”¹³⁰

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan yang sudah di paparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa selama ini pembagian Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh pemerintah tanpa ada pemotongan dari siapapun dan pihak apapun. Sehingga berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Ketapang sudah tepat jumlah.

- 3) Tepat waktu; Waktu pelaksanaan BPNT kepada keluarga penerima manfaat KPM sesuai dengan Rencana.

Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Ketapang dilakukan setiap satu bulan sekali, hanya saja tanggal pelaksanaannya tidak menentu tetapi biasanya seminggu sebelum pelaksanaan dari tingkat Kecamatan mengabari di tingkat Kelurahan Ketapang.

¹²⁹ Wawancara dengan Ibu Kosidah, penerima program BPNT Kelurahan Ketapang, pada tanggal 15/6/2019, pukul 10.15 WIB.

¹³⁰ Wawancara dengan Ibu Jamsiyah, penerima program BPNT Kelurahan Ketapang, pada tanggal 22/7/2019, pukul 10.10 WIB.

Menurut wawancara dengan Pendamping BPNT Kelurahan Ketapang, Ibu Rukatun mengatakan bahwa waktu pencairan dana BPNT selalu sesuai denganketetapan dari pemerintah. Tidak pernah ada keterlambatan pencairan. Berikut kutipan wawancaranya:

“Disini Saya sebagai pendamping Program BPNT ketika ingin menyalurkan bantuan dari pemerintah ke tangan peserta, saya sebagai pendamping terlebih dahulumengkoordinasikan dengan pihak bank, lalu menginformasikan kepada penerima manfaat, sebelum itu pendamping juga berkoordinasi dengan operator untuk memastikan rekening penerima manfaat sudah diaktivasi, selesai pengambilansembako di E-warong KUBE tersebut pendamping merekap data-data yang sudah menerima ataumengambil bantuan tersebut atau mengontrol penerima manfaat dalam pengambilan bantuan di E-Warong itu. Program BPNT selalu turun tepat waktu selama saya mendampingi. Dan tidak pernah molor dari jadwal yang ditentukan pemerintah yaitu setiap satu bulan sekali cuman tanggalnya yang tidak menentu. Biasanya saya langsung memberitahukan kepada KPM kalau dana BPNT sudah turun. Jadi bisa diambil melalui ATM merah untuk di tukarkan sembako. Saya selalu mendampingi di E-warong KUBE jika ada KPM yang mau menukarkan sembako.”¹³¹

Menurut Ibu Saminem penerima BPNT juga mengatakan selalu turun tepat waktu. Berikut kutipan wawancaranya:

“Program BPNT selalu turun tepat waktu mbak. Tidak pernah terlambat. Yaitu setiap satu bulan sekali.”¹³²

Hasil wawancara dengan Ibu Munarsih juga menyampaikan bahwa pemerintah sudah tepat waktu dalam menyalurkan BPNT. Berikut kutipan wawancaranya:

“Iya mbak. Selalu tepat waktu kok. Tidak pernah terlambat. Setiap satu bulan sekali mbak. Belum waktunya turun saja, kadang sudah diharapkan untuk turun.”¹³³

¹³¹ Wawancara dengan Ibu Rukatun, selaku pendamping program BPNT Kelurahan Ketapang, pada tanggal 19/1/2019, pukul 10.00 WIB.

¹³² Wawancara dengan Ibu Saminem, penerima program BPNT Kelurahan Ketapang, pada tanggal 15/6/2019, pukul 08.30 WIB.

¹³³ Wawancara dengan Ibu Munarsih, penerima program BPNT Kelurahan Ketapang, pada tanggal 19/1/2019, pukul 09.10 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pembagian program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Ketapang sudah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah yaitu satu bulan sekali meskipun tanggal tidak menentu. Sehingga berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Ketapang sudah tepat waktu.

- 4) Tepat harga; Harga bus BPNT sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.

Program BPNT ini tidak dikenakan biaya sepeserpun oleh peserta KPM karena KPM memanfaatkan BPNT melalui *e-Warong*, yaitu agen bank, pedagang dan/ atau pihak lain yang bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian bahan pangan oleh KPM. KPM membawa KKS datang ke *e-Warong* yang bertanda khusus Non Tunai dan sudah bekerjasama dengan Bank Penyalur. Di bawah ini diuraikan pandangan mengenai ketepatan harga dari penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal. Berikut kutipan wawancara dengan Ibu Kosidah:

“ Saya sebagai penerima program BPNT ini setiap bulan selalu tak ambil dengan gratis, saya tidak pernah membayar sepeserpun. BPNT ini sebenarnya kan memang gratis untuk setiap KPM, tinggal nanti mengambil langsung ke E-Warong dan hanya menyerahkan kartu ATM saja. Biasanya pendamping program ini juga ikut memantau untuk datang ke E-Warong itu, dan mendata siapa yang sudah mengambil bantuan.”¹³⁴

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Saminem, selaku penerima BPNT Kelurahan Ketapang:

“ di Kelurahan Ketapang ini semua penerima BPNT tidak pernah membayar sepeserpun untuk menebus sembako yang diterima termasuk saya selalu mengambil dengan cara gratis, kalo bantuan sudah datang tinggal datang ke E-Warong dan jangan lupa

¹³⁴ Wawancara dengan Ibu Kosidah, penerima program BPNT Kelurahan Ketapang, pada tanggal 15/6/2019, pukul 10.15 WIB.

membawa kartu ATM yang telah di terima oleh KPM terus ditukarkan dengan sembako."¹³⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan bahwa dalam pelaksanaan program BPNT di Kelurahan Ketapang sudah tepat harga, karena dari pihak pemerintah sudah menetapkan bahwa dalam pengambilan BPNT ini tidak dikenakan biaya sepeserpun oleh peserta KPM/ di ambil dengan cara gratis dan berdasarkan hasil wawancara dengan peserta BPNT Kelurahan Ketapang membenarkan dalam pengambilan bantuan tidak membayar sepeserpun.

5) Tepatkualitas;

Terpenuhi persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras Medium.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Jamsiyah berkaitan dengan ketepatan kualitas bantuan program BPNT ialah sebagai berikut:

" Bantuan sembako berupa beras dan telur yang di terima saya itu layak untuk di konsumsi, Karena beras yang saya terima tidak berbau dan berwarna, untuk kualitas telur yang saya terima juga bagus. Setiap satu bulan sekali kualitas sembako yang saya terima selalu sama tidak pernah berubah- berubah. Kualitasnya selalu bagus mbk."¹³⁶

Wawancara dengan Ibu Munarsih juga mengungkapkan hal yang sama, bahwa:

" Kualitas beras dan telur yang saya terima layak untuk di konsumsi mbak. beras dan telur yang saya terima membantu mengurangi beban pengeluaran Keluarga saya melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang lebih seimbang kepada Keluarga saya yang termasuk KPM."¹³⁷

¹³⁵ Wawancara dengan Ibu Saminem, penerima program BPNT Kelurahan Ketapang, pada tanggal 15/6/2019, pukul 08.30 WIB.

¹³⁶ Wawancara dengan Ibu Jamsiyah, penerima program BPNT Kelurahan Ketapang, pada tanggal 22/7/2019, pukul 10.10 WIB.

¹³⁷ Wawancara dengan Ibu Munarsih, penerima program BPNT Kelurahan Ketapang, pada tanggal 19/1/2019, pukul 09.10 WIB.

Berdasarkan hasil uraian di atas menunjukkan bahwa kualitas beras dan telur layak untuk di konsumsi, karena beras yang di terima tidak berwarna dan berbau dan kualitas telur juga bagus. Sehingga berdasarkan hasil diatas dapat di katakan bahwa program BPNT di Kelurahan Ketapang ini sudah tepat kualitasnya.

- 6) Tepat administrasi; Terpenuhi persyaratan Administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.

Penerima program BPNT di Kelurahan Ketapang menjawab tidak ada persyaratan yang harus dipenuhi dalam menerima beras dan telur. Ibu Jamsiyah membenarkan tidak ada persyaratan dalam mengambil beras dan telur tersebut, cuman pada saat di awal pendataan ada persyaratan yaitu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Bantuan Pangan Non Tunai yang telah terdata, nama-nama yang terdata dapat mendapatkan kartu ATM berwarna merah dengan syarat mengikuti sosialisasi di balai desa, mengumpulkan fotocopy KK dan fotocopy KTP, setelah itu kartu dapat diambil di Kecamatan Kendal. Kartu yang digunakan dalam penyaluran BPNT adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yaitu kartu debit atas nama penerima bantuan dari keluarga miskin.¹³⁸ Sehingga berdasarkan uraian di atas mengenai ketepatan administrasi program BPNT Kelurahan Ketapang sudah termasuk tepat administrasi, di awal pendataan ada persyaratan yang harus di lakukan oleh KPM dan untuk ke depannya dalam menerima sembako beras dan telur sudah tidak ada persyaratan yang harus di penuhi.

Berdasarkan indikator 6T diatas bahwasanya program BPNT di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal ini belum terlaksana dengan baik. Karena adanya ketidak tepatan sasaran yang belum terpenuhi penerapannya di lapangan. Ketidak tepatan sasaran dalam hal ini menunjukkan bahwa dari data yang diperoleh terdapat adanya keluarga yang kurang mampu tidak mendapatkan program BPNT

¹³⁸Wawancara dengan Ibu Jamsiyah, penerima program BPNT Kelurahan Ketapang, pada tanggal 22/7/2019, pukul 10.10 WIB.

dari Pemerintah, dan ada juga keluarga yang terbilang mampu masih mendapatkan program BPNT. Karena sebagian besar penerima program BPNT di Kelurahan Ketapang ini keluarga yang keadaan perekonomiannya cukup baik, dalam hal ini sebagian besar dari mereka memiliki lahan pertanian. Walaupun para petani tidak dapat merasakan hasil dari apa yang mereka tanam setiap harinya namun mereka masih dapat memenuhi segala kebutuhan di dalam keluarga mereka dengan mengandalkan pendapatan dari hasil panen raya mereka untuk beberapa bulan kedepan. Masih ada keluarga miskin yang ada di Kelurahan Ketapang yang belum merasakan manfaat adanya program BPNT ini, seperti para rumah tangga pendatang yang status ekonominya dikatakan tidak mampu namun belum terdata oleh pihak kelurahan atas hak mereka menerima program BPNT. Kurangnya ketepatan sasaran ini mengakibatkan kecemburuan sosial. Ada juga keluarga yang sudah dikatakan mampu namun masih menerima program BPNT hal ini karena program BPNT ini masih menggunakan data lama sehingga keluarga yang dulunya tidak mampu sekarang sudah mampu masih mendapatkan program BPNT dan masih banyak juga keluarga yang sudah mampu tetapi tidak sadar atau tidak mengetahui tujuan adanya program BPNT ini jadi mereka tidak ingin melepasnya karena tidak ada orang yang tidak ingin mendapatkan sesuatu yang gratis sekalipun keluarganya sudah mampu. Dalam penetapan nama rumah tangga penerima manfaat program BPNT seharusnya benar-benar dilakukan secara objektif, tidak semata-mata mengedepankan keluarga yang keadaannya sudah mampu namun ingin mendapatkan program BPNT. Padahal masih banyak keluarga yang berhak merasakan manfaat program BPNT ini.

Meskipun demikian, indikator ketepatan waktu dalam pembagian program BPNT Kelurahan Ketapang sudah berjalan dengan baik karena sudah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah yaitu satu bulan sekali meskipun tanggal tidak menentu. Indikator ketepatan administrasi juga sudah terlaksana dengan baik karena persyaratan hanya

ada pada awal pendataan yang harus di lakukan oleh (KPM) dan untuk ke depannya dalam menerima sembako beras dan telur sudah tidak ada persyaratan yang harus di penuhi. Indikator ketepatan kualitas, ketepatan harga dan jumlah sudah terlaksana dengan baik. Keluarga yang menerima program BPNT di Kelurahan Ketapang mengatakan ketepatan kualitas beras dan telur yang diberikan oleh pemerintah layak untuk di konsumsi. Ketepatan harga seluruh keluarga yang menerima program BPNT di Kelurahan Ketapang mengatakan harganya gratis, tidak ada pembayaran sepeserpun oleh pihak Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Ketepatan jumlah juga sudah tepat yaitu Keluarga Penerima Manfaat dapat menerima uang sebesar Rp 110,000,- per bulan melalui sebuah kartu yang di terima kemudian di tukarkan sembako berupa beras 10 Kg dan telur $\frac{1}{4}$ Kg. Berdasarkan hasil lapangan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program BPNT di Kelurahan Ketapang belum memenuhi 6 indikator tercapainya suatu program BPNT, Karena hanya 5 indikator yang sudah terlaksana dengan baik yaitu ketepatan waktu, ketepatan administrasi, ketepatan kualitas, ketepatan harga dan jumlah. Untuk mencapainya kesuksesan suatu program BPNT dibutuhkan seluruh indikator terpenuhi atau berjalan dengan baik.

B. Analisis Hasil Yang Telah Di Capai Melalui Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Miskin Di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal

Kebijakan pemerintah dalam menangani kemiskinan di setiap daerah dengan memberdayakan kelompok masyarakat khususnya Kelurahan Ketapang adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui *E-Warong* yang ada sejak tahun 2018. Adanya program BPNT yang terselenggara diharapkan bisa memberikan hasil yang positif bagi Keluarga Penerima Manfaat. Masyarakat dapat mengembangkannya kemampuan berwirausaha, dengan mengenalkan transaksi pelayanan secara elektronik

menggunakan Kartu elektronik Keluarga Sejahtera (KKS), yang diberikan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Program BPNT yang diterapkan di Kelurahan Ketapang agar menjadikan masyarakat dapat mandiri dalam melakukan transaksi non tunai pada *e-Warong* Program BPNT dan membantu masyarakat dalam segi ekonomi seperti pemenuhan kebutuhan sehari-hari dapat mengurangi beban pengeluaran dari masyarakat yang dulunya tidak berkecukupan sekarang semakin meningkat daya beli masyarakatnya. Meningkatkan efektivitas bantuan sosial dengan cara non tunai dalam pemberian bahan pangan, serta mendorong keuangan inklusif yakni mengikut sertakan masyarakat untuk menjadi wirausaha. Pemerintah membuat program BPNT berarti merangkul masyarakat dalam mengembangkan kemampuan berwirausaha dengan membuka *e-Warong* KUBE BPNT, tidak adanya penyalahgunaan dana bantuan yang diberikan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dengan menggunakan Kartu elektronik Keluarga Sejahtera (KKS) masyarakat tidak dapat menggunakan uangnya selain membeli bahan pangan beras dan telur.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, untuk pencapaian hasil keberhasilan proses implementasi terkait dengan implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam peningkatan ekonomi keluarga miskin di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal perlu adanya dukungan sumber daya, sikap para pelaksanan komunikasi antar organisasi.

1. Sumber Daya

Sumber daya mempunyai peran yang penting dalam implementasi kebijakan.¹³⁹ Sumber daya merupakan keberhasilan proses implementasi kebijakan yang dipengaruhi dengan memanfaatkan sumber daya manusia, keuangan, waktu dan fasilitas yang dapat mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Sumber

¹³⁹ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, (Sidoarjo: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 98.

daya manusia ditujukan kepada siapa yang menjalankan pelaksanaan program di lapangan dan sejauhmana pelaksana memahami tentang tugasnya. Sedangkan sumber daya keuangan (*financial*) dimaksudkan untuk mengetahui dari mana sumber dana yang diperoleh terkait program BPNT. Sumber daya waktu dimaksudkan waktu pelaksanaan. Sumber daya fasilitas terkait ketersediaan yang di butuhkan untuk proses implementasi. Didalam implementasi diperlukan dukungan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. Kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia juga akan mempengaruhi keberhasilan proses implementasi kebijakan. Tanpa adanya dukungan sumber daya manusia, sumber daya financial dan sumber daya waktu tentunya sebuah kebijakan tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Sumber daya manusia yang paling penting didalam implementasi kebijakan. Dibutuhkan sumber daya yang kompeten didalam pelaksanaan program agar tujuan dari kebijakan dapat tercapai.

Terkait pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, Tentunya keberhasilan pelaksana program tidak terlepas dari aktor-aktor lingkup Kelurahan. Aktor pelaksana yang terdiri dari pendamping Kelurahan, lurah, pemilik *e-Warong* KUBE dan masyarakat setempat yang ikut membantu dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Kendal Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal. Peran aktor pelaksana tersebut sangatlah penting karena tanpa adanya kerja sama dari aktor pelaksana tentunya kebijakan tidak akan berjalan dengan baik. Program ini juga yang menentukan sukses tidaknya adalah pemerintah kelurahan, karena yang termasuk ikut andil. Sumber daya finansial atau dana pada program Bantuan Pangan Non Tunai ini berasal dari Kementerian Sosial yang langsung di transfer ke rekening-rekening KPM sebesar Rp 110.000,-/bulan. untuk sumber daya dana sudah sesuai dengan yang ditentukan dalam pedoman pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sumber daya waktu untuk pelaksanaan Bantuan Pangan Non

Tunai sudah efektif. Karena uang yang tersalurkan setiap bulan tidak ada kendala. Sumber daya fasilitas sendiri sampai saat ini tidak ada kendala yaitu tidak ada gangguan pada mesin EDC, sehingga proses implementasi tidak terganggu. Fasilitas bantuan yang di terima KPM juga kualitasnya bagus, layak untuk di konsumsi.¹⁴⁰

2. Disposisi/ Sikap Para Pelaksana

Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.¹⁴¹ Pelaksana yang terlibat dalam program inikhususnya di Kelurahan Ketapang sudah menjalankan tugas, pokok dan fungsinyamasing-masing. Sikap pelaksana program *e-Warong* KUBE BPNT yang dalam hal ini pendamping BPNT, pemilik *e-Warong*, bank penyalur dan pihak lainnya cukup optimal. Dimana pelaksana kebijakan ini sudah menyadari akan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pelaksana program Bantuan Pangan Non Tunai untuk terus memperbaiki program yang dibuat oleh pemerintah menjadi lebih baik, menunjukkan bahwa adanya komitmen dari para pelaksana untuk menjalankan program BPNT. Namun untuk dukungan serta komitmen Kelurahan Ketapang, pelaksanaan program BPNT tersebut belum optimal, terlihat dari sikap kurang ketelitian dalam mendata masyarakat penerima program BPNT.¹⁴²

3. Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan.

Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.

¹⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Muchamad Subechi, selaku lurah Ketapang, pada tanggal 22/7/2019, pukul 08.00 WIB.

¹⁴¹ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, (Sidoarjo: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 102.

¹⁴² Wawancara dengan Bapak Muchamad Subechi, selaku lurah Ketapang, pada tanggal 22/7/2019, pukul 08.00 WIB.

Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.¹⁴³

Pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui *E-Warong* di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal pada awal implementasi program tidak terjadi miskomunikasi antar aktor dari tingkat Kelurahan maupun pusat. Karena sebelumnya pelaksanaan program dari Kementerian Sosial sudah memberikan sosialisasi baik standar, tujuan dan sasaran dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal. Dimana hasil sosialisasi disampaikan kepada masyarakat Kelurahan Ketapang agar masyarakat mengetahui secara rinci isi dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Untuk penyampaian sosialisasi pada KPM dilakukan di Kelurahan yang disampaikan oleh Dinas Sosial dan dibantu oleh pendamping. Pada saat ini semua KPM dikumpulkan di Kelurahan dan dijelaskan secara rinci mengenai standar, tujuan dan sasaran dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui *E-Warong* ini. Tidak hanya itu, pendamping juga melakukan sosialisasi secara rutin pada saat transaksi program Bantuan agar masyarakat paham. Sehingga komunikasi antar organisasi terjalin dengan baik.¹⁴⁴

¹⁴³ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, (Sidoarjo: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 96.

¹⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Muchamad Subechi, selaku lurah Ketapang, pada tanggal 22/7/2019, pukul 08.00 WIB.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memberikan pembahasan secara keseluruhan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi program BPNT di Kelurahan Ketapang ini belum dapat memenuhi indikator 6T ketepatan BPNT, dimana 6T ini sangat berpengaruh terhadap kesuksesan suatu program BPNT di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal. Dari indikator 6T bahwa pada kenyataan di lapangan program BPNT ini hanya 5 indikator yang sudah terlaksana dengan baik yaitu ketepatan waktu, ketepatan administrasi, ketepatan kualitas, ketepatan harga dan jumlah. Kelurahan Ketapang dalam pelaksanaan program BPNT masih ada ketidak tepatan sasaran yang belum terpenuhi penerapannya di lapangan. Ketidak tepatan sasaran dalam hal ini menunjukkan bahwa dari data yang diperoleh terdapat adanya keluarga yang kurang mampu tidak mendapatkan program BPNT dari Pemerintah, dan ada juga keluarga yang terbilang mampu masih mendapatkan program BPNT.
2. Hasil penelitian yang telah dicapai dari Implementasi Program BPNT perlu adanya dukungan sumber daya, sikap para pelaksana dan komunikasi antar organisasi, dengan dukungan dan peran dari semua elemen suatu program dapat terlaksana dengan baik. Dimana dengan adanya program BPNT Kelurahan Ketapang yang diterapkan dapat menjadikan masyarakatnya lebih mandiri dalam melakukan transaksi non tunai pada *e-Warong* Program BPNT dan membantu masyarakat dalam segi ekonomi seperti pemenuhan kebutuhan sehari-hari dapat mengurangi beban pengeluaran dari masyarakat yang dulunya tidak berkecukupan sekarang sudah semakin meningkat daya beli masyarakatnya.

Meningkatkan efektivitas bantuan sosial dengan cara non tunai dalam pemberian bahan pangan, serta mendorong keuangan inklusif yakni mengikut sertakan masyarakat untuk menjadi wirausaha. Pemerintah membuat program BPNT berarti merangkul masyarakat dalam mengembangkan kemampuan berwirausaha dengan membuka *e-Warong* KUBE BPNT, tidak adanya penyalahgunaan dana bantuan yang diberikan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dengan menggunakan Kartu elektronik Keluarga Sejahtera (KKS) masyarakat tidak dapat menggunakan uangnya selain membeli bahan pangan beras dan telur.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat memberikan saran sebagaiberikut:

1. Diharapkan adanya tinjauan ulang ke lapangan dari pihak Kelurahan agar program BPNT ini dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan sesuai dengan indikator tepat sasaran, Sebaiknya dilakukan survei untuk mendata kembali warga miskin secara objektif dalam menentukan peserta program miskin untuk mengurangi masalah kecemburuan yang ada dimasyarakat.
2. Di harapkan adanya kesadaran masyarakat mampu yang masih menerima program BPNT untuk tidak menerima bantuan lagi dan segera mengembalikan kartunya, sehingga masyarakat miskin yang sangat membutuhkan dapat merasakan manfaat dari bantuan program BPNT ini.
3. Bagi Petugas Program BPNT/pendamping BPNT harus lebih mengarahkan untuk kedepannya agar lebih memfokuskan pada proses penyadaran KPM agar tidak ada lagi ketergantungan terhadap bantuan-bantuan pemerintah.
4. Untuk penelitian lanjutan, perlu diteliti Implementasi beberapa program penanggulangan kemiskinan lainnya yang telah dilakukan oleh pemerintah sehingga dapat diketahui program mana yang memiliki pengaruh yang lebih besar dalam mengurangi angka kemiskinan dan dicari bentuk sinergi atau kombinasi diantaranya agar implementasi dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan ekonomilebih tinggi lagi.

C. Penutup

Allhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Tiada kemudahan dan setelah kesulitan melainkan atas kehendak Allah SWT. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Harapan penulis mudah-mudahan skripsi ini memberi kemanfaatan bagi pembaca. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun sangat peneliti butuhkan demi kesempurnaan skripsi ini. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, dan semoga Allah senantiasa memberi rahmat, taufiq serta hidayah-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal'amin

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, SolichinWahab. 2014. *AnalisisKebijakandariFormulasikePenyusunan Model- Model ImplementasiKebijakanPublik*. Jakarta: BumiAksara.
- Azra, Azyumardi. 2003. *BerdermauntukSemuaWacanadanPraktikFilantropi Islam*. Jakarta: PenerbitTeraju.
- Arifin, Imamul. 2007. *Membuka Cakrawala Ekonomi*. Bandung: PT. Setia Purna Inves.
- Aini, Nurul. 2018. “*Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung*”, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- A.W. Gerungan. 1978. *Psikologi- Sosial Suatu Ringkasan*. Jakarta-Bandung: PT Eresco, 1978.
- Badruzaman, Abad. 2007. *Teologi Kaum Tertindas*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Curatman, Aang. 2010.*Teori Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Swagati Press.
- Doriza, S. 2015. *Ekonomi Keluarga*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Ofset.
- Dokumentasi Data Monografi Kelurahan Ketapang Tahun 2019.
- Data Monografi dan Demografi Kelurahan Ketapang Tahun 2019.
- Haughton, Jonathan danShahidur R. Khandker. 2012. *PedomantentangKemiskinandanKetimpangan*. Jakarta: SalembaEmpat.
- Hikmat, Mahi. 2011. *MetodePenelitian*. Yogyakarta: GrahaIlmu.
- Irfan, M. Islamy. 2014. *KebijakanPublik*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Ishandi, Adi Rukminto. 2003. *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Jakarta: Fisip UI Press.
- J, LexyMeleong. 2004. *MetodePenelitianKualitatif*. Bandung: RemajaRosdakarya.
- J. M. Henslein. 2006. *Sosiologi Dengan Pendekatan Membumi Edisi ke-6 jilid 2*. Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, Mudrajat. 2010. *Dasar- Dasar Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: UPPS TIM YKPN.
- Kontjaraningrat. 2010. *MetodePenelitianMasyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.

- Mabruk, Hijriatul. 2016. “ *Implementasi Program Beras Rumah Tangga Miskin (RASKIN) di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang*”. Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Mangku, Qi Bahjatulloh. Desember, 2016. *Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kegiatan Filantropi*. Vol.10, No. 2.
- Margono, S. 2000. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Masta, Megayana. 2016. *Implementasi Distribusi Beras Sejahtera (RASTRA) Di Desa Tanjung Jati Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus*. Dalam Skripsi. Universitas Bandar Lampung.
- Muhadjir, Noeng. 2011. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- M. M. Friedman. 1998. *Keperawatan Keluarga Teori Dan Praktik*, Edisi 3. Jakarta: EGC.
- M, Darmansyah. *Ilmu Sosial Dasar, Usaha Nasional*. 1986. Surabaya: Indonesia.
- Munandar, M Solaeman. 1995. *Ilmu Sosial Dasar, Teori Dan Konsep Ilmu Sosial*. Bandung: Eresco.
- Nur, Frida Rizkia. 2017. “*Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Melalui Program P2WKSS Di Sumber Gamol, Balecatur, Gamping, Sleman*”, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Panggayuh, Singgih. 2014. *Efektivitas Pengelolaan Program Raskin Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik*. Dalam Skripsi. Surabaya: Universitas Wijaya Putra.
- Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai. 2017.
- Pedoman Umum Bantuan Sosial BPNT Tahun 2018.
- Pemetaan Swadaya Kelurahan Ketapang Tahun 2019.
- Prihatiningtyas, Siti. 2011. *Pemikiran Dakwah Mr. Sjafruddin Prawiranegara di Bidang Ekonomi*. IAIN Walisongo Semarang: Anggaran DIPA-BLU.
- Putong, Iskandar. 2002. *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro Edisi 2*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rachman, Benny, dkk. Juni, 2018. *Efektivitas dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (RASTRA) Dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Effectiveness and Perspective of Rice for the Poor and Non-Cash Food Assistance (BPNT) Programs*. Vol.16, No. 1.

- Rizki, Yovinda Amelia. 2017. *Model Tingkat Kemiskinan Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah (Tahun 2010-2016)*. Dalam Skripsi. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Rahmad, Jalaludin. 1993. *Islam Alternatif ceramah-ceramah di kampus*. Bandung: Mizan.
- Rusli, M. Karim. 1993. *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya Bekerjasama Dengan P3EL UII.
- Rangkuman Informasi Program BPNT Tahun 2019.
- Shahira, MayangJunaidi, dkk. Agustus 2017. *The Satisfaction Comparison Of Bantuan Pangan Non Tunai Recipients And Rastra Recipients In Cakung District, East Jakarta*. Vol. 15, No. 2.
- Soehartono, Irawan. 2002. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto. 1990. *Sosiologi Sesuatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- . 2015. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soetomo. 2012. *Keswadayaan Masyarakat Manifestasi Kapasitas Masyarakat Untuk Berkembang Secara Mandiri*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- . 2013. *Masalah Sosial Dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- . 2013. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta.
- . 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2013. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- . 2013. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. Bandung: Alfabeta.
- . 2014. *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- . 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial)*. Bandung: PT Refika Aditama.

- Suryadi, Ekoman. 2016. “ *Implementasi Program BerasMiskin (RASKIN) Tahun 2015 di KelurahanPringsewu Barat KecamatanPringsewuKabupatenPringsewu*”. Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Syauqi, Ahmad. Juli- Desember 2011. *EfektivitasKinerjaPelaksanaan Program BerasMiskin di Kota Banjarmasin*. Vol. 1, No. 2.
- Sjafari, Agus. 2014. *Kemiskinan Dan Pemberdayaan Kelompok*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soekirno, Sanado. 2001. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Widodo, Joko. 2006. *AnalisisKebijakanPublik: KonsepdanAplikasiAnalisis Proses KebijakanPublik*. Sidoarjo: Bayumedia Publishing.
- Yetti, Misra. 2011. “*PendistribusianBerasMiskin (RASKIN) di KelurahanTelukMerbauMenurutPerspektifEkonomi Islam*”. Riau: UIN Sultan SyarifKasim.
- Yasyin, Sulchan. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amanah.
- <http://layanansosial.blogspot.com/2018/02/pengertian-tujuan-dan-manfaat-bpnt.html>. diakses pada 21 Oktober 2018. 10. 10.
- <https://www.scribd.com/doc/297694243/Pengertian-Ekonomi-Keluarga>. diakses pada tanggal 15 Desember 2019. Pukul 08. 50 WIB.
- <https://andreaspa.wordpress.com/2011/04/17/home-industri/>. Diakses pada tanggal 15 Desember 2019. Pukul 08. 35.
- <https://andreaspa.wordpress.com/2011/04/17/home-industri/>
- WawancaradenganIbuMunarsih, penerima program BPNT KelurahanKetapang, padatanggal 19/1/2019, pukul 09.10 WIB.
- WawancaradenganIbuRukatun, selaku pendamping program BPNT KelurahanKetapang, padatanggal 19/1/2019, pukul 10.00 WIB.
- WawancaradenganIbuSaminem, penerima program BPNT KelurahanKetapang, padatanggal 15/6/2019, pukul 08.30 WIB.
- WawancaradenganIbuJamsiyah, penerima program BPNT KelurahanKetapang, padatanggal 22/7/2019, pukul 10.10 WIB.
- Wawancara dengan Ibu Kosidah, penerima program BPNT Kelurahan Ketapang, pada tanggal 15/6/2019, pukul 10.15 WIB.
- Wawancara dengan Ibu Pujiasih, pemilik *e-Warong* program BPNT Kelurahan Ketapang, pada tanggal 15/6/2019, pukul 09.15 WIB.
- Wawancara dengan Bapak Muchamad Subechi, selaku lurah Ketapang, pada tanggal 22/7/2019, pukul 08.00 WIB.

DRAF WAWANCARA

1. Pertanyaan mengenai gambaran umum Kelurahan Ketapang yang diajukan kepada Lurah Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal
 - a. Bagaimana letak geografis dan batas administrative Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal?
 - b. Berapa jumlah penduduk dan jumlah penerima BPNT di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal?
 - c. Bagaimana mata pencaharian penduduk di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal?
 - d. Bagaimana tingkat pendidikan penduduk di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal?
 - e. Bagaimana kondisi ekonomi sosial budaya di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal?
 - f. Bagaimana struktur kepengurusannya di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal?
 - g. Apakah sudah misi program BPNT di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal?
 - h. Bagaimana implementasi program BPNT dalam peningkatan ekonomi keluarga miskin di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal?
 - i. Apakah hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan program BPNT di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal?
2. Pertanyaan terkait proses pelaksanaan program BPNT yang diajukan kepada pendamping program BPNT di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal
 - a. Bagaimana proses pelaksanaan program BPNT di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal?

- b. Apakah tujuan dari pelaksanaan program BPNT di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal?
 - c. Kapan program BPNT dilaksanakan di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal?
 - d. Siapa yang menerima program BPNT di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal?
 - e. Apakah telah dilakukan sosialisasi terkait program BPNT di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal?
 - f. Siapa saja yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program BPNT khususnya di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal?
 - g. Apakah telah dilaksanakan program BPNT di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal?
 - h. Berapa jumlah bantuan yang dapat diperoleh KPM di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal?
 - i. Apakah hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan program BPNT di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal?
3. Pertanyaan yang diajukan kepada penerima bantuan pangan non-tunai (BPNT) di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal
- a. Apakah pernah mengikuti sosialisasi terkait program BPNT di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal?
 - b. Apakah manfaat yang dirasakan dengan adanya program BPNT di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal?
 - c. Apakah harapan terkait dengan adanya program BPNT di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal?
 - d. Apakah dana BPNT yang diterima sesuai jumlah yang telah ditetapkan?
 - e. Bagaimana kualitas bahan pokok yang didapat di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal?
 - f. Berapa harga busan bahan pokok di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal?
 - g. Apakah hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan program BPNT di Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal?

Lampiran
Dokumentasi dan Observasi

Kantor Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal



Kartu yang digunakan dalam penyaluran BPNT adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)



Wawancara dengan Bapak Muchamad Subechi, selaku lurah Ketapang



Wawancara dengan Ibu Pujiasih, pemilik *e-Warung* program BPNT Kelurahan Ketapang



e-Warung KUBE singkatan dari Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama merupakan warung penjual sembako/bahan pangan yang bekerja sama dalam penyaluran program BPNT



Wawancara dengan Ibu Jamsiyah, penerima program BPNT Kelurahan Ketapang



Wawancara dengan Ibu Saminem, penerima program BPNT Kelurahan Ketapang



Wawancara dengan Ibu Kosidah, penerima program BPNT Kelurahan Ketapang



Wawancara dengan Ibu Munarsih, penerima program BPNT Kelurahan Ketapang



Wawancara dengan Ibu Rukatun, selaku pendamping program BPNT Kelurahan Ketapang



Pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kelurahan Ketapang





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : *Kuswatun Khasanah*
TTL : *Batang, 15 Oktober 1996*
Jenis Kelamin : *Perempuan*
Agama : *Islam*
Alamat : *Ds. Cluwuk, Kec. Tulis, Kab. Batang*

Jenjang Pendidikan

SD : *SD Negeri Cluwuk*
MTs : *MTs Negeri Kendal*
MAN : *Madrasah Aliyah Negeri Kendal*
SI : *Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN
Walisongo Semarang*

Semarang, 05 Maret 2020

Kuswatun Khasanah
1401046049